

LAPORAN PENELITIAN

PRINSI-PRINSIP HUKUM ACARA PERADILAN ISLAM

(relevansinya dengan Hukum Acara Peradilan Agama

di Indonesia)

Oleh

Rajin Sitepu, S.H, M.Hum



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN

MASYARAKAT (LP2M)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2016

KATA PENGATAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan Syukur dipersembahkan kehadiran Allah SWT dengan nikmat, taufik dan hidayah-Nya semua aktivitas dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Laporan penelitian ini berjudul: PRINSIP-PRINSIP HUKUM ACARA PERADILAN ISLAM (Relevansinya dengan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia)",

Untuk itu ucapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag, selaku rektor UIN SU yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.
2. Bapak Prof. Dr. Pagar, M.Ag, Kepala Lembaga Penelitian UIN Sumatera Utara, yang memberikan izin dan Bimbingan kepada penulis melaksanakan penelitian ini.

Akhirul kalam, seomoga hasil penelitian ini bermanfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan keagamaan.

Medan, 12 Desember 2016

Penelitian

Rajin Sitepu, S.H, M.Hum

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
 BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Sistematika Pembahasan	7
 BAB II METODE PENELITIAN	9
A. Pendekatan	9
B. Data dan Sumber Data	10
C. Instrumen Pengumpulan Data	11
D. Pengolahan dan Analisis Data.....	12
 BAB III SEJARAH PERADILAN ISLAM.....	13
A. Pengertian Qadha	13
B. Dasar Hukum Diperintahkannya Qadha	15
C. Peradilan pada Masa Rasulullah SAW	16
D. Peradilan pada Masa Khulafa al-Rasyidin	18
E. Peradilan pada Masa Bani Umayyah	21
F. Peradilan pada Masa Bani Abbas	24
G. Peradilan pada Masa Turki Usmani	27
 BAB IV PERADILAN AGAMA DI INDONESIA	35
A. Sejarah Peradilan Agama	35
1. Peradilan Agama Sebelum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia	36
2. Peradilan Agama Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia	47
B. Hukum Acara Peradilan Agama	60

KATA PENGANTAR	DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Ruang Lingkup	3
D. Sistematika Penulisan	4
BAB II METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan	5
B. Data dan Sumber Data	6
C. Instrumen Pengumpulan Data	7
D. Pengolahan dan Analisis Data	8
BAB III SELARAH PERADILAN ISLAM	
A. Pengertian	9
B. Dasar Hukum	10
C. Peradilan pada Masa Rasulullah SAW	11
D. Peradilan pada Masa Khulafat al-Rasyidin	12
E. Peradilan pada Masa Umayyad	13
F. Peradilan pada Masa Abbasi	14
G. Peradilan pada Masa Turki Umayyad	15
BAB IV PERADILAN AGAMA DI INDONESIA	
A. Sejarah Peradilan Agama	16
B. Peradilan Agama Setelah Proklamasi	17
C. Perkembangan Peradilan Agama Setelah Proklamasi	18
D. Peradilan Agama Setelah Proklamasi	19
E. Peradilan Agama Setelah Proklamasi	20
F. Peradilan Agama Setelah Proklamasi	21
G. Peradilan Agama Setelah Proklamasi	22
H. Peradilan Agama Setelah Proklamasi	23
I. Peradilan Agama Setelah Proklamasi	24
J. Peradilan Agama Setelah Proklamasi	25
K. Peradilan Agama Setelah Proklamasi	26
L. Peradilan Agama Setelah Proklamasi	27
M. Peradilan Agama Setelah Proklamasi	28
N. Peradilan Agama Setelah Proklamasi	29
O. Peradilan Agama Setelah Proklamasi	30
P. Peradilan Agama Setelah Proklamasi	31
Q. Peradilan Agama Setelah Proklamasi	32
R. Peradilan Agama Setelah Proklamasi	33
S. Peradilan Agama Setelah Proklamasi	34
T. Peradilan Agama Setelah Proklamasi	35
U. Peradilan Agama Setelah Proklamasi	36
V. Peradilan Agama Setelah Proklamasi	37
W. Peradilan Agama Setelah Proklamasi	38
X. Peradilan Agama Setelah Proklamasi	39
Y. Peradilan Agama Setelah Proklamasi	40
Z. Peradilan Agama Setelah Proklamasi	41

BAB V

RELEVANSI HUKUM ACARA PERADILAN ISLAM DENGAN HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

A. Latar Belakang	69
B. Prinsip-Prinsip Hukum Acara Peradilan Islam	69
C. Relevansi Hukum Acara Peradilan Islam dengan Hukum Acara Peradilan Agama	102

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan	120
B. Saran	121

DAFTAR PUSTAKA	123
----------------	-----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tanggal 20 Maret 2006, telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kelahiran undang-undang ini telah membawa banyak perubahan dan kemajuan bagi Peradilan Agama sebagai salah satu lembaga peradilan resmi negara yang sejajar dengan lembaga peradilan negara lainnya yakni Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Tercatat dari undang-undang ini telah terjadi perubahan antara lain dalam hal:

1. Dapat diadakanya pengkhususan pengadilan di lingkungan peradilan agama (lihat pasal 3A, yakni pasal baru yang disisipkan di antara Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989). Aturan ini sebelumnya tidak ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;
2. Pemisahan Peradilan Agama dari lembaga eksekutif dan Departemen Agama yang membawahnya selama ini secara organisasi, administrasi dan keuangan (lihat perubahan antara lain dalam pasal 5, 12, dan 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
3. Kewenangan absolut Peradilan Agama di bidang: perkawinan, waris wasiat, hibah, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah (lihat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). Sebelumnya kewenangan peradilan agama hanya dalam bidang: perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam, wakaf dan shadaqah.

Di antara banyak hal yang telah berubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini, sesungguhnya bagi peneliti masih ada suatu hal besar yang seharusnya juga berubah. Hal itu adalah mengenai masalah hukum acara peradilan agama. Hukum acara peradilan agama yang berlaku di lingkungan peradilan agama hingga saat ini masih belum berubah dari yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yakni hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum itu sendiri hingga saat ini masih menggunakan produk hukum kolonial, yakni: *HIR (Het Herziene Inlandsche Reglement)* atau disebut juga *RIB (Reglement Indonesia yang Dibaharui)*, *RBg (Rechts Reglement Buitengewesten)* atau disebut juga Reglement untuk Daerah Seberang, maksudnya untuk luar Jawa-Madura, *Rsv (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering)* yang zaman jajahan Belanda dahulu berlaku untuk *Raad van Justitie, B.W. (Burgerlijke Wetboek)* atau disebut juga Kitab Undang-undang Hukum Perdata Eropa, karena hingga saat ini belum ada hukum acara perdata yang baru yang menggantikannya. Ditentukan dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989: "Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini."

Memperhatikan keseluruhan aturan hukum acara dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ini, hal yang telah diatur secara khusus, yang berarti menyimpang dari hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum sebagaimana ditentukan

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 itu, ternyata tidak banyak. Aturan itu antara lain tentang tiap penetapan dan putusan yang dimulai dengan kalimat BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM diikuti dengan kalimat DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA (Pasal 57 ayat (2)).

Timbul pertanyaan, mengapakah Undang-undang Peradilan Agama hingga saat ini masih memberlakukan hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum sebagai hukum acaranya, padahal dalam sejarah peradaban Islam diketahui Islam juga memiliki hukum peradilan dan segala yang bersangkutan paut dengan hakim (*qadhi*) di dalam siyasah *Qadha-iyah syari'ah*. Seperti dijelaskan Busthanul Arifin,¹ walaupun tidak dapat ditemukan kitab dan buku hukum yang melukiskan sara khusus bagaimana susunan, kekuasaan dan acara-acara badan-badan peradilan, namun dapat ditemukan prinsip-prinsip pokok tentang perlunya suatu pengadilan, atau perlunya ada *qadhi*/hakim, syarat seorang hakim, saksi-saksi, sumpah, dan beberapa cara pembuktian dari kitab-kitab Hukum Islam, baik kitab-kitab hukum klasik (kitab kuning) maupun buku-buku hukum yang lebih dekat dengan kita. Artinya kita dapat membuat aturan hukum acara peradilan agama berdasarkan prinsip-prinsip pokok peradilan Islam yang dasar-dasarnya telah diletakan dalam kitab dan buku-buku Hukum Islam. Roihan A. Rasyid² menjelaskan Peradilan Agama merupakan

¹Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia (Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 77-78.

²Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), h. 10.

peradilan perdata dan Islam di Indonesia, jadi dia harus mengindahkan peraturan perundang-undangan negara dan syariat Islam sekaligus.

Dilihat dari berbagai sudut, memberlakukan hukum acara perdata dalam lingkungan peradilan umum ini, tentu tidak pada tempatnya. Dari sudut *konsistensi*, tentu tidak konsisten memberlakukan Hukum Acara Perdata dalam lingkungan Peradilan Umum sebagai hukum acara Peradilan Agama (hukum formiel) sementara dalam hukum materielnya telah diberlakukan Hukum Islam, yakni Kompilasi Hukum Islam (KHI) walaupun eksistensinya belum kuat³ oleh karena tidak didasarkan oleh suatu undang-undang. Disamping itu, secara *politis* menggunakan Hukum Acara Perdata dalam lingkungan Peradilan Umum sebagai hukum acara Peradilan Agama yang notabene memberlakukan hukum peninggalan pemerintah kolonial Belanda, tentu juga tidak pada tempatnya. Begitu juga dilihat dari sudut lain, yakni syarat keberlakuan hukum secara filosofis, tentu tidak pada tempatnya memberlakukan hukum acara dalam lingkungan Peradilan Umum sebagai Hukum Acara Peradilan Agama. Berdasarkan syarat keberlakuan hukum secara filosofis, suatu kaedah hukum dikatakan

³Mengenai eksistensi KHI sebagai hukum materiel Peradilan Agama, Chatib Rasyid, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam makalahnya yang berjudul: *Peranan Fakultas Syari'ah dan Pengadilan Agama dalam Menegakkan Hukum Islam*, disampaikan pada Pelaksanaan Studium General Fakultas Syari'ah IAIN Sumatera Utara Tahun 2007 menjelaskan: "Di antara empat lingkungan peradilan di Mahkamah Agung, satu-satunya peradilan yang hukum materielnya didasarkan pada Inpres adalah Peradilan Agama. Hal ini menjadi persoalan tersendiri sebab walaupun telah dipedomani oleh hakim di seluruh Peradilan Agama di Indonesia, akan tetapi ada pihak yang memandang status KHI sebagai hukum tidak tertulis, artinya sama saja dengan kitab fikih yang selama ini menjadi hukum materiel di lingkungan Peradilan Agama pra kelahiran KHI.

berlaku secara filosofis apabila kaedah hukum itu sesuai atau tidak bertentangan dengan cita-cita hukum suatu masyarakat sebagai nilai positif yang tertinggi dalam falsafah hidup masyarakat itu.⁴ Dalam hal falsafah hidup masyarakat Indonesia, yang dijadikan ukuran adalah falsafah Pancasila, yang dalam studi hukum dikenal sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Pancasila yang di dalam sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, di dalamnya terkandung nilai-nilai ke-Tuhan-an, yang menjiwai sila-sila Pancasila berikutnya yakni: sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradap, sila Persatuan Indonesia, sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan dan sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, mengandung makna bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak boleh ada yang

⁴Soejono Soekanto dan Mustafa Abdullah dalam buku *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat* menjelaskan didalam teori-teori hukum, biasanya dibedakan antara tiga macam hal berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal berlakunya kaedah-kaedah hukum tersebut biasanya disebut *gelding* (bahasa Belanda) atau *geltung* (bahasa Jerman). Tentang hal berlakunya kaedah hukum itu adalah di samping syarat keberlakuan secara filosofis adalah syarat keberlakuan secara yuridis apabila penentunya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatnya (Hans Kelsen), atau bila dibentuk menurut cara yang telah ditetapkan (W. Zevenbergen), atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya (J.H.A.Logemann).Syarat keberlakuannya secara sosiologis maksudnya adalah suatu kaedah hukum berlaku secara sosiologis apabila kaedah tersebut efektif. Artinya kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau kaedah itu berlaku karena ditrima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan). Penjelasan tentang syarat keberlakuan hukum ini, lihat pula Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Angkasa 1995), h. 12.

C. bertentangan dengan nilai-nilai ke-Tuhan-an. Tidak boleh ada hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai ke-Tuhan-an, sebagaimana diyakini oleh masing-masing pemeluk agama dari agama dan kepercayaan itu. Itu artinya tidak boleh ada hukum yang bertentangan dengan Hukum Agama Islam sebagai agama yang diyakini oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

D. **Key** Selain dari segala pertimbangan tersebut, yang lebih penting lagi adalah keharusan adanya undang-undang tersendiri tentang acara Peradilan Agama adalah perintah undang-undang. Ditentukan dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004: "Susunan kekuasaan dan hukum acara Mahkamah Agung dan badan pradilan yang berada di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dengan Undang-Undang.

2. Berangkat dari hal tersebut, maka keberadaan ataupun perubahan hukum acara Peradilan Agama ini menjadi suatu keniscayaan, dan untuk tujuan itu, penelitian ini dilakukan untuk menggali prinsip-prinsip peradilan dalam Islam serta melihat bagaimana prinsip-prinsip peradilan tersebut dapat memenuhi kebutuhan hukum acara Peradilan Agama saat sekarang ini.

B. Perumusan Masalah

Masalah yang akan dicari jawabanya dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah prinsip-prinsip peradilan Islam itu?
2. Bagaimana relevansi prinsip-prinsip peradilan Islam itu dikaitkan dengan hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui prinsip-prinsip peradilan Islam;
2. Untuk mengetahui relevansi prinsip-prinsip peradilan Islam dikaitkan dengan hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan berguna, baik secara teoretis maupun secara praktis.

1. Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan akan menambah khazanah kepustakaan dalam ilmu syari'ah, khususnya ilmu tentang hukum acara peradilan.

2. Praktis

Secara praktis, penelitian ini akan disumbangkan bagi kalangan lembaga Peradilan Agama dan pembentuk undang-undang untuk menjadi bahan masukan guna kepentingan amandemen terhadap pasal-pasal hukum acara dalam undang-undang peradilan agama.

E. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari 6 (enam) bab. Bab I, Pendahuluan, berisi uraian tentang: latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab II, Metode Penelitian, berisi uraian tentang: pendekatan, data dan sumber data, instrumen pengumpulan data, dan pengolahan dan analisis data. Bab III, Sejarah Peradilan Islam, berisi uraian tentang: pengertian *qadha*, dasar

hukum diperintahkan qadha, peradilan pada masa Rasulullah, peradilan pada masa Khulafa Rasyidin, peradilan pada masa Bani Umayyah, peradilan pada masa Bani Abas, dan peradilan pada masa Turki Usmani. Bab IV, Peradilan Agama di Indonesia, berisi uraian tentang: sejarah peradilan agama yang menguraikan: peradilan agama sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, Peradilan Agama setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan hukum acara Peradilan Agama. Bab V, Hukum Acara Peradilan Islam dan relevansinya dengan hukum acara Peradilan Agama Indonesia, berisi uraian tentang ada atau tidak hukum acara Peradilan Agama itu mengadopsi prinsip-prinsip peradilan Islam dan sejauh mana prinsip-prinsip hukum acara Peradilan Islam itu relevan untuk memenuhi kebutuhan akan hukum acara Peradilan Islam saat sekarang ini. Bab VI, Penutup, berisi uraian tentang: kesimpulan dan saran.

BAB II METODE PENELITIAN

A. Pendekatan

Sebagaimana dijelaskan pada bab permasalahan, hal yang akan dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah prinsip-prinsip peradilan dalam Islam dan relevansinya dengan kebutuhan hukum acara peradilan agama saat sekarang ini. Untuk menjawab permasalahan ini, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan sejarah hukum, pendekatan hukum normatif dan pendekatan hukum empirik.

Pendekatan sejarah hukum dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang sejarah peradilan Islam yang meliputi: peradilan di masa Rasulullah SAW, peradilan di masa Khulafa', peradilan di masa Bani Umayyah, peradilan di masa Bani Abbas, dan peradilan di masa Daulat Usmaniyah. Termasuk dalam pendekatan sejarah ini dilakukan pula untuk memperoleh gambaran tentang peradilan di negara-negara Islam saat sekarang ini. Dari sejarah peradilan Islam ini kemudian ditarik apakah prinsip-prinsip peradilan Islam itu.

Pendekatan hukum normatif dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang norma hukum dalam undang-undang peradilan agama, yakni: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Adapun pendekatan hukum empiris dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang relevansi prinsip-prinsip peradilan Islam itu dengan kebutuhan hukum acara peradilan agama saat sekarang ini.

B. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini diambilkan dari sumber:

1. Data sekunder

Data ini adalah data tentang peradilan Islam dan data tentang normatif hukum acara Peradilan Agama, diambilkan dari kitab-kitab fiqh, buku-buku yang relevan, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta buku-buku yang relevan dengan itu, yaitu:

- a. Al-Qadha Fil Islam karangan Abdus Salam Madkur;
- b. Tarikhul Qadha Al-Islami karangan Mahmud Arnus;
- c. Peradilan dan Hukum Acara Islam karangan TM. Hasbi Ash Shiddieqy;
- d. Peradilan dalam Islam karangan Muhammad Salam Madkur, alih bahasa Imron, AM;
- e. Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia (Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya, karangan Busthanul Arifin;
- f. Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah Indonesia, karangan M Fauzan;

g. Hukum Islam dalam Berbagai Wacana, karangan Abdul Manan.

2. Data Primer

Data ini adalah data tentang relevansi prinsip-prinsip peradilan Islam dengan kebutuhan hukum acara Peradilan Agama saat sekarang ini, diambilkan dari kalangan praktisi Peradilan Agama dan kalangan akademisi. Seperti dijelaskan oleh Busthanul Arifin,¹ masalah kelembagaan peradilan ini memang termasuk bidang ijthadi, oleh karena itu bisa saja berbeda-beda di setiap negara Islam maupun di negara-negara yang ada masyarakat muslimnya. Atas dasar itulah maka wawancara terhadap praktisi dan akademisi ini dilakukan, mereka adalah pihak-pihak yang paling berkompeten berbicara dalam masalah ini, yang sehari-hari berkecimpung dengan dunia Peradilan Agama (hakim) dan melakukan kajian-kajian ilmiah dalam masalah hukum (akademisi), yang paling mengerti masalah kebutuhan hukum acara Peradilan Agama.

C. Instrumen Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan instrumen:

1. Studi bahan pustaka/dokumen

¹Busthanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia (Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 78.

Instrumen ini dipergunakan dalam mengumpulkan data tentang peradilan Islam dan data tentang normatif hukum acara Peradilan Agama dari bahan-bahan pustaka/dokumen yang relevan.

2. Wawancara

Instrumen ini dipergunakan dalam mengumpulkan data tentang relevansi prinsip-prinsip peradilan Islam dengan kebutuhan hukum acara Peradilan Agama saat sekarang ini dari kalangan praktisi Peradilan Agama dan kalangan Akademisi.

D. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara: data yang telah terkumpul pertama-tama dikelompokkelompokkan. Dalam hal ini dikelompokkan data tentang peradilan Islam dari data normatif hukum acara Peradilan Agama. Begitu pula dikelompokkan dari data tentang kebutuhan hukum acara Peradilan Agama saat sekarang ini.

Selanjutnya data yang ada ini dianalisis dengan cara menghubungkan-hubungkannya untuk melihat ada atau tidak hukum acara Peradilan Agama itu mengadopsi prinsip-prinsip peradilan Islam. Jika ada, diuraikan seberapa besarkah itu, dan seberapa besar pula yang tidak. Jika tidak, dianalisis pula dapatkah prinsip-prinsip itu diadopsi untuk suasana masyarakat muslim Indonesia, yakni untuk mengisi kebutuhan akan hukum acara Peradilan Agama yang hingga saat sekarang ini masih menggunakan hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum.

BAB III

SEJARAH PERADILAN ISLAM

A. Pengertian Qadha

Secara bahasa kata al-qadha merupakan bentuk masdar dari kata:

قضى - يقضى - قضاء - قضيا - وقضية

yang memiliki beberapa pengertian:

1. Menyelesaikan, seperti firman Allah Swt:

فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها

(Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengannya).

2. Menunaikan, seperti firman Allah Swt:

فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض : الجمعة : 10

(Apabila salat telah ditunaikan, maka pergilah ke seluruh pelosok bumi)

3. Memutuskan hukum atau menetapkan suatu ketetapan , seperti firman Allah Swt:

وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا : الاسراء : 23

(Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya).

Dari beberapa pengertian bahasa ini, ulama sepakat bahwa qadha dengan pengertian memutuskan hukum atau menetapkan sesuatu ketetapan, itulah yang dimaksud dalam pengertian peradilan.

Sementara pengertian qadha menurut istilah adalah:

فصل الخصومات وقطع المنازعات¹

(Menetapkan dan memutuskan hukum atas orang-orang yang berperkara)

Menurut Syafi'iyah qadha adalah:

فصل المخصوصة بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالى : أي إظهار حكم الشرع في الواقعة²

“Menetapkan hukum antara dua orang yang berselisih atau lebih dengan hukum Allah Swt artinya: Menyatakan hukum syara' atas suatu peristiwa”

Adapun menurut Hanabilah qadha berarti:

تبين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الحكومات³

“Menentukan hukum syara' dan aturan-aturannya dan menetapkan hukum”

Sementara menurut Hanafiyah qadha berarti :

الحكم بين الناس بالحق⁴

“Memutuskan hukum di antara manusia dengan benar”.

Menurut Malikiyah, qadha berarti:

الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام⁵

¹Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz VI (Beirut: Dar al-Fikr) h. 480.

²*Ibid.*

³Muhammad Abdul Kadir Abu Faris, *Al-Qada fi al-Islam* (Dar al-Furqan, 1984) h. 16.

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid.*

“Pemberitahuan tentang hukum syara’ dengan jalan yang seharusnya”

(Dan Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian qadha secara terminologi adalah penyelesaian suatu perkara terhadap orang-orang yang bersengketa berdasarkan hukum Allah secara adil.

Penyelesaian suatu perkara yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat berdasarkan hukum Allah baik dari Alquran, Hadis atau dari istimbat keduanya, dan putusan hakim dalam hal ini mempunyai kekuatan hukum mengikat.

B. Dasar Hukum Diperintahkan Qadha

Dasar hukum diperintahkan qadha berasal dari Alquran dan Sunnah. Beberapa ayat Alquran yang menjadi dasar pelaksanaan qadha di antaranya adalah:

1. Surah Shad ayat 6 yaitu:

يا داود انا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق
(Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu sebagai Khalifah/penguasa di bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil).

2. Surah al-Maidah ayat 65 yaitu:

فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم
(Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan).

3. Surah al-Nisa' ayat 49, yaitu:

وان احكم بينهم بما انزل الله

(Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah).

Sementara dasar pelaksanaan qadha yang berasal dari sunnah terdapat baik sunnah quliyah maupun sunnah fi'liyah. Berdasarkan sunnah quliyah adalah sabda Rasulullah Saw :

اذا اجتهد الحاكم فأصاب فله اجران وإن اجتهد فأخطأ فله اجر واحد

(Apabila hakim berijtihad lalu benar, maka baginya dua pahala, dan apabila ia berijtihad kemudian salah, maka baginya satu pahala).

Adapun sunnah fi'liyah sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibn Abbas bahwa Nabi Saw memutuskan dengan sumpah terhadap terdakwa. Demikian juga pada masa kerasulannya, beliau pernah mengutus Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Mu'az bin Jabal dan 'Itab bin Asid menjadi hakim.

C. Peradilan Pada Masa Rasulullah Saw

Setelah Islam datang dan Allah memerintahkan Nabi Muhammad Saw menyampaikan risalah yang diterimanya, beliau juga diperintahkan untuk menyelesaikan segala sengketa yang terjadi antara sesama umatnya. Dengan demikian dapatlah kita mengatakan bahwa hakim pertama dalam Islam adalah Rasulullah sendiri. Hal ini sangatlah jelas sekali apabila kita perhatikan sumpah yang Nabi lakukan antara golongan muhajirin dan penduduk Madinah. Nabi

"At-Tahqiq al-Madani" (Madinah, 1964) h. 21.

bertindak demikian untuk memenuhi tuntutan ayat 59 dan 65 dari surah Al-Nisa'.

Di Madinah Rasulullah tampil sebagai figur sentral untuk menyelesaikan persengketaan-persengketaan, memberi fatwa, menyampaikan kepada manusia apa yang diwahyukan Allah kepadanya tentang hukum-hukum dan mengatur pelaksanaan hukum-hukum tersebut. Di tangan beliaulah terhimpun wewenang untuk menetapkan hukum, wewenang melaksanakan hukum dan wewenang mengawasi jalannya pelaksanaan hukum tersebut.⁶

Dalam menetapkan hukum dan memutuskan perkara, Nabi senantiasa berpegang kepada ayat-ayat Alquran yang ada kaitannya dengan perkara tersebut. Jika ayat itu telah secara rinci menjelaskan ketentuan hukumnya, Nabi hanya melaksanakan saja seperti pada hukum pidana, sedangkan tata cara pelaksanaannya, nabi selalu mencontohkan sebagaimana yang pernah beliau lakukan. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada kasus perzinahan Ma'iz dan al-Gamidiyah. Rasulullah tidak langsung menerima pengakuan dari Ma'iz bahwa ia telah berbuat zina. Selain itu beliau juga berhak menetapkan hukum mengenai masalah-masalah yang belum jelas ditetapkan dalam Alquran.

Dengan semakin luasnya daerah Islam, Rasulullah kemudian mendelegasikan peradilan pada penguasa setempat yang ditunjuk oleh Rasulullah. Umar ibn Khatthab pernah bertindak sebagai hakim

⁶Athiyah Mustafa Musyirifah, *Al-Qada fi al-Islam* (tp: Syirkah al-Syarq al-Ausat, 1964) h. 81.

dimasa Rasulullah masih hidup, Ali bin Abi Thalib pernah diutus Rasulullah ke Yaman untuk menjadi hakim dan apabila putusan Ali itu disanggah, maka Ali menyampaikan putusan itu kepada Rasulullah Saw.

Dari peristiwa Ali dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa:

1. Kekuasaan eksekutif dan yudikatif berada pada satu tangan
2. Di masa Rasulullah telah dikenal adanya peninjauan kembali putusan dari tingkat bawah ke tingkat atas
3. Telah dikenal pengukuhan atas putusan peradilan yang lebih rendah oleh peradilan yang lebih tinggi.

Selain itu Rasulullah juga memberi beberapa petunjuk tentang hal-hal yang diperlukan bagi seorang hakim ketika akan memutuskan perkara, di antaranya hakim tidak boleh memutuskan perkara sebelum mendengar dari kedua belah pihak yang bersengketa, melarang memberi syafaat dalam pelaksanaan hudud, larangan memberi atau menerima sogok, larangan memutuskan perkara ketika dalam keadaan marah.

Pada masa Rasulullah, beliau menetapkan gaji untuk para hakim. 'Attab bin asid menceritakan bahwa Rasulullah memberinya dua dirham untuk setiap hari.

D. Peradilan Pada Masa Khulafa Al-Rasyidin

Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar diangkat menjadi Khalifah yang pertama. Beliau melaksanakan tugas sebagai pengganti Rasulullah dalam urusan pemerintahan dan

kemasyarakatan. Dalam bidang peradilan tidak tampak ada perubahan mendasar, keadaannya tetap seperti semula. Ada riwayat menyatakan bahwa selama pemerintahannya, Abu Bakar menyerahkan urusan peradilan kepada Umar ibn Khattab. Lebih kurang 2 tahun Umar bertindak sebagai kepala peradilan, tidak ada seorangpun yang datang untuk menyelesaikan perkara, karena para sahabat mengetahui bahwa Umar adalah orang yang sangat tegas, dan pada waktu itu para sahabat sangat besar toleransinya.

Dalam kitab *I'lamul Muaqiin*, yang dikutip oleh Abdul Qadir Zaidan dikatakan bahwa apabila disampaikan kepada Abu Bakar suatu sengketa maka beliau berusaha menyelesaikan sengketa itu dengan merujuk kepada Alquran, bila tidak ada, beliau merujuk kepada Hadis Nabi Saw. Jika beliau tidak menemukan di dalam sunnah Rasulullah Saw maka beliau bertanya kepada ahli ilmu apakah mereka mengetahui putusan Rasulullah terhadap sengketa tersebut. Jika tidak ada yang mengetahui, beliau mengumpulkan para sahabat untuk berembuk putusan apa yang akan diberikan, lalu mereka sepakat untuk menetapkan suatu hukum, maka beliau pun berpegang pada putusan itu, dan inilah *ijma'*.⁷

Di masa Khalifah Umar ibn Khattab, daerah Islam semakin luas, tugas-tugas yang dihadapi pemerintah dalam bidang politik, ekonomi dan sosial semakin komplek. Karena itu, Khalifah Umar tidak dapat menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Lalu beliau memisahkan kedudukan eksekutif dan yudikatif. Khalifah

⁷ Zaidan, h. 119.

Umar mengangkat Abu Darda menjadi hakim di Madinah, Usman bin Qais bin Abil 'Ash di Mesir, Abu Musa al-Asy'ari di Kufah, Syuraih di Basrah.⁸ Inilah pengangkatan qadi pertama dalam pemerintahan Islam secara resmi. Akan tetapi, wewenang para qadi itu masih terbatas pada sengketa harta benda saja atau urusan perdata saja. Sedangkan perkara pidana/jinayat menyangkut qisas, hudud masih tetap wewenang Khalifah atau Amir sebagai penguasa daerah. Diriwayatkan pada masa pemerintahan Umar sedikit sekali persengketaan yang diajukan kepada Amir atau kepada Umar sendiri. Hal ini disebabkan karena wibawa, sikap tegas dan keadilan Umar dalam menjalankan pemerintahannya, sehingga rakyat kecil ataupun orang besar merasa segan kepada beliau bahkan terhadap keluarganya pun beliau tetap berlaku adil.

Beberapa kebijaksanaan yang ditempuh Umar dalam bidang peradilan antara lain beliau tidak memberi zakat kepada orang muallaf seperti kepada Abu sufyan, dan Uyainah bin Hasan. Juga tidak menghukum potong tangan bagi pencuri pada tahun terjadinya musim paceklik, Umar juga menjatuhkan talak tiga yang dijatuhkan oleh suami sekaligus, yang mana sebelumnya dianggap talak satu.⁹

Untuk memberi petunjuk teknis kepada para qadi, Umar menulis semacam hukum acara yang dikenal dengan *Risalah al-Qadha* sebagai pegangan bagi para hakim. Beliau juga memberikan gaji bagi pejabat peradilan yang diambil dari kas baitul mal.

⁸ Musyrifah, *Al-Qada fi al-Islam*, h. 94.

⁹ Zaidan, *al-Madkhal*, h. 122-125.

Sementara pada masa pemerintahan Usman dan Ali, pada umumnya tidak terdapat perubahan yang mencolok, kebijakan peradilan masih tetap sebagaimana pada masa Khalifah sebelumnya. Hanya pada masa pemerintahan Usman dibangun gedung peradilan, sehingga peradilan dilakukan di gedung resmi, yang sebelumnya hanya dilakukan di mesjid-mesjid, serta menata administrasi secara lebih baik.

E. Peradilan Pada Masa Bani Umayyah

Pada masa pemerintahan Bani Umayyah daerah Islam semakin luas bahkan telah meliputi Syiria dan Palestina di sebelah Utara, Turkmenia dan Afganistan di sebelah timur, Afrika Utara dan Spanyol di sebelah Barat, sehingga para ulama baik di kalangan sahabat maupun tabi'in tidak lagi terkonsentrasi di pusat ataupun di satu wilayah, tetapi menyebar ke berbagai daerah Islam. Hal ini tentu saja mempengaruhi kebijaksanaan yang dilakukan Khalifah di bidang peradilan. Pengangkatan hakim-hakim di daerah diserahkan kepada para gubernur/wakil khalifah di daerah, sedangkan khalifah hanya mengangkat hakim khusus untuk ibu kota/ pusat saja.¹⁰

Kedudukan dan wewenang hakim baik di pusat maupun di daerah adalah sama. Oleh karena itu masing-masing hakim berdiri sendiri. Antara hakim yang satu dengan hakim lainnya tidak mempunyai hak untuk mengatur, mengawasi, mengontrol dan

¹⁰Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh al-Islam*, (Ttp: Maktabah Nahdhah al-Misriyah, Juz I) h. 489-490.

memberikan instruksi kepada yang lainnya. Semua kewajiban itu berada di tangan Khalifah dan Gubernur di mana hakim tersebut bertugas dan kepada merekalah hakim ini bertanggung jawab.¹¹

Pada masa ini belum ada hakim yang diberi tugas khusus menangani pidana, sanksi/hukuman ataupun yang bersifat mendidik seperti penjara. Hal-hal yang berhubungan dengan masalah itu langsung ditangani Khalifah atau wakilnya. Kecuali pernah pada suatu kali Muawiyah memberikan wewenang kepada hakim yang bertugas di Mesir untuk menangani masalah pidana.¹² Menurut analisa ulama mengapa masalah pidana masih dipegang Khalifah karena masalah pidana itu merupakan masalah yang cukup berat yang memerlukan kehati-hatian.¹³

Umumnya ulama-ulama yang diangkat menjadi hakim adalah ulama yang berkualifikasi sebagai mujtahid sehingga dalam memutuskan perkara yang terjadi mereka tidak terikat pada pendapat tertentu.¹⁴ Karena memang pada waktu itu belum dikenal budaya taklid, sebab mazhab mazhab memang belum ada.¹⁵

Para hakim di masa bani Umayyah ini dalam memutuskan perkara juga sama seperti masa Khulafaur rasyidin, yakni melakukan ijtihad dalam memutuskan suatu perkara jika masalah tersebut belum ada ketetapanannya baik dari Alquran, hadis maupun ijma'. Apabila

¹¹ Madkur, *al-Qada*, h. 29.

¹² *Ibid*.

¹³ Hasan, *Tarikh*, h. 490.

¹⁴ Madkur, *Al-Qada*, h. 30.

¹⁵ Abd. Rahman ibn Hayim, *Al-Qada wa Nizamuhu fi al-Kitab wa al-Sunnah* (Ttp: Mathba'ah Jami'ah al-Qura, 1984) h. 265.

seorang hakim mengalami kesulitan dalam menentukan hukum terhadap suatu permasalahan, maka ia meminta bantuan kepada fuqaha lain yang ada di tempat di mana hakim itu bertugas. Bahkan dalam masalah yang sangat sulit, tidak jarang di antara mereka meminta pandangan Khalifah atau gubernur setempat.¹⁶ Namun hal ini tidaklah mengurangi independen mereka. Pada dasarnya Khalifah bertugas hanya sebagai pengawas dan pengontrol apa-apa yang dilakukan hakim. Jika ada yang menyimpang atau menyeleweng, maka khalifah segera menghentikannya. Dengan begitu jelaslah pembagian tugas antara Khalifah (eksekutif) dan lembaga peradilan (yudikatif).

Pada masa itu setiap keputusan hakim belum lagi disusun dan dibukukan. Setiap orang yang berperkara, mengajukan perkaranya kepada hakim secara lisan. Hakim lalu memeriksa kemudian memberikan keputusannya dan menjelaskan dasar pegangan hakim. Salim ibn 'Adi tercatat sebagai hakim di masa ini yang pernah mencatat keputusan hukumnya. Beliau seorang hakim di Mesir. Hal ini dilakukannya pada kasus warisan. Awalnya Salim telah menjatuhkan putusan terhadap masalah itu, namun tak lama kemudian mereka berselisih kembali tentang masalah itu dan mengingkari keputusan hakim. Lalu mereka menghadap Salim kembali. Akhirnya setelah memberikan putusan untuk kedua kalinya, Salim mencatat hasil keputusan itu.

¹⁶ Madkur, *Al-Qada*, h. 30.

Persyaratan menjadi hakim pada masa ini selain Islam, baligh, berakal dan sebagainya juga memiliki kriteria tertentu sebagaimana yang diajukan oleh Khalifah Umar ibn Aziz, yakni seorang hakim haruslah tegas, suci dari perbuatan keji, senantiasa menjaga kehormatan, bersifat penyantun, mengetahui keputusan hakim terdahulu dan bagaimana mereka menyelesaikan suatu perkara (yurisprudensi).

Wilayah kekuasaan hukum qadi hanya meliputi orang muslim saja, rakyat yang bukan muslim tetap mempergunakan lembaga-lembaga hukum tradisional mereka masing-masing, termasuk dalam hal ini pengadilan Nasrani.¹⁷ Di antara nama-nama hakim yang terkenal pada masa ini adalah Sulaim ibn Atar, Abbas ibn Said, Basyir ibn al-Nadhir al-Ranzany, Abdurrahman ibn Hujairah, Yunus ibn 'Atiyah.¹⁸

F. Peradilan Islam Pada Masa Bani Abbas

Pada masa ini perhatian tidak lagi diprioritaskan kepada masalah invasi ke daerah-daerah, tetapi lebih kepada pengembangan dan peningkatan peradaban, ilmu pengetahuan, ekonomi dan sosial budaya. Keadaan ini mendorong munculnya mujtahid-mujtahid bahkan melahirkan mazhab –mazhab tertentu. Di antaranya adalah Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ahmad ibn Hanbal, yang dikenal dengan empat mazhab. Hal ini banyak mempengaruhi

¹⁷Joseph Schaht, *Pengantar Hukum Islam*, Terj. (Jakarta: P3SPTA, 1985) h. 35.

¹⁸Musyirif, *Al-Qada*, h. 188-189.

aturan-aturan peradilan. Para qadi banyak merujuk kepada pendapat imam mazhab ini dalam bentuk taklid sehingga melemahkan ruh ijihad.

Penyebab munculnya penyakit taklid pada masa itu, di samping kepintaran empat imam mazhab tersebut juga karena adanya political will dari Khalifah yang cenderung memaksakan lembaga peradilan dan rakyat untuk mengikuti mazhabnya. Seperti yang dilakukan Khalifah Harun al-Rasyid yang memaksa imam mazhab agar mengajak umat untuk mengikuti mazhabnya.

Karena mengikuti mazhab tertentu terjadilah keputusan hakim beragam, meskipun pada persoalan yang sama. Sehingga ada hakim di Iraq memutuskan perkara berdasarkan Mazhab Hanafi, di Syam dan Magribi sesuai dengan Mazhab Maliki, sedangkan di Mesir berdasarkan Mazhab Syafi'i. Apabila ada dua orang yang berperkara yang mazhabnya berbeda dengan mazhab kotanya, mengajukan perkara, maka qadinya akan diganti dengan qadi yang sesuai dengan mazhab orang yang berperkara tersebut.

Upaya-upaya intervensi para khalifah terhadap lembaga peradilan sering terjadi. Hal ini mengakibatkan banyaknya para hakim yang meninggalkan jabatannya.¹⁹ Kadang-kadang para hakim hanya dijadikan alat untuk mendorong kebijaksanaan politik mereka. Banyak fakta yang menunjukkan bahwa keputusan hakim dijadikan sebagai alat untuk menggolkan ambisi politik tersebut. Perjanjian

¹⁹ Madkur, *Al-Qada*, h. 31.

perlindungan kepada para pimpinan 'Alawiyin banyak yang dilanggar oleh mereka, dengan mempergunakan keputusan hakim untuk membenarkan tindakan mereka. Hal ini terjadi pada kasus Abu Muslim al-Khurasani dan pamannya Abdullah ibn Ali yang dibunuh oleh Abu Ja'far al-Mansur, Yahya ibn Abdullah ibn Hasan al-'Alawi menjadi korban politik di tangan Harun al-Rasyid dan sebagainya.²⁰

Selain tindakan negatif tersebut, nilai positif yang mereka wujudkan pada masa ini terhadap lembaga peradilan adalah terbentuknya Qadi al-Qudhah, jabatan baru dalam peradilan pada masa itu. Hakim pertama yang diangkat menduduki jabatan itu adalah Abu Yusuf murid Abu Hanifah. Qadi al-Qudhah adalah kepala dari semua hakim-hakim yang ada. Ia berada di pusat pemerintahan dan bertugas mengawasi, mengangkat dan memberhentikan hakim-hakim di daerah.²¹ Bila kita bandingkan dengan negara Indonesia, hal ini seperti Mahkamah Agung di Indonesia.

Kemajuan lain dalam bidang peradilan pada masa ini adalah pengaturan administrasi. Di antaranya adalah mendirikan gedung peradilan yang luas, terletak di tengah-tengah kota agar mudah terjangkau oleh masyarakat dan melakukan pencatatan setiap keputusan hakim, bahkan juga mencatatkan wasiat-wasiat dan utang piutang.

²⁰Hasan Ibrahim Hasan, *Al-Nuzhum al-Islamiyyh* (Ttp: Maktabah Nahdah al-Misriyyah, tt.) h. 280.

²¹Madkur, *Al-Qada*, h. 31.

Pada masa bani Abbas ini juga, kekuasaan hakim mulai diperluas. Mereka tidak hanya menangani masalah perdata saja, tetapi juga masalah pidana, perwakafan, perwalian dan lain-lain.

Dalam masalah kesaksian, para hakim telah memilih para saksi dalam setiap perkara dengan ekstra hati-hati. Misalnya, saksi tersebut harus diketahui oleh hakim bahwa ia jauh dari perbuatan tercela. Kalau belum diketahui atau belum dikenal, hakim akan meminta informasi tentang kebaikan dan keburukan yang pernah dilakukan oleh saksi tersebut kepada para tetangganya. Bahkan nama-nama saksi itu dicatatkan di sebuah buku, seperti yang pernah dilakukan oleh 'Abdurrahman al-'Umari, hakim di Mesir pada tahun 185 H.²²

Di antara para hakim yang terkenal pada masa Bani Abbas adalah Abu Yusuf, 'Abdullah ibn Lahi'ah, Mifdhal ibn Fadhalah, Yazid ibn 'Abdullah ibn 'Abdurrahman (hakim yang pernah menulis peradilan dengan sebutan "*Ghauts*", pertolongan/bantuan).

G. Peradilan Pada Masa Turki Usmani

Pembahasan tentang peradilan pada masa Turki Usmani dibagi pada dua periode yaitu periode sebelum Tandhimat dan periode setelah Tandhimat.

1. Peradilan Islam Sebelum Tandhimat (1300-1839 M).

Di masa Turki Usmani pemerintahannya dipimpin oleh seorang khalifah atau sultan yang merupakan kepala negara sekaligus pula sebagai kepala agama. Kekuasaan sultan dalam

²²Ibn Hayyim, *Al-Qada*, h. 286.

bidang hukum dan peradilan di samping yang berkaitan dengan urusan sipil, juga hal-hal yang berkaitan dengan urusan-urusan politik (siyasi), militer ('askari) dan tata usaha negara (idari).²³ Oleh karena itu kewenangannya dipilah pada dua bagian, yaitu hukum-hukum syari'ah dan hukum-hukum non syari'ah. Kedua kewenangan ini masing-masing diserahkan kepada lembaga dan pejabat yang berbeda. Kedua kelembagaan itu adalah al-qadi dan al-syurtah.

Al-qadi merupakan kelembagaan yang disertai kewenangan dalam pelaksanaan hukum syari'ah. Secara hierarkis, di samping qadi yang ada di pusat kota, juga tersebar qadi-qadi yang ada di daerah-daerah. Seluruh kekuasaan qadi dikepalai oleh qadi al-qudat yang berkedudukan di tingkat pusat (ibu kota kerajaan). Qadi-qadi dan kekuasaan kehakiman tertentu yang dibawah atau dikepalai oleh qadi al-qudat itu adalah:

- a. Qadi (biasa), yaitu qadi atau qadi-qadi yang berwenang menangani perkara-perkara sipil bukan militer.
- b. Qadi al-Jund atau qadi al-'askari yaitu qadi yang berwenang dan mempunyai tugas menyelesaikan perkara-perkara di lapangan militer.
- c. Nadhir al-madhalim, yaitu pejabat kehakiman yang menyelesaikan perkara-perkara yang menyangkut penyelewengan-penyelewengan pejabat pemerintah (peradilan tata usaha negara). Tugasnya antara lain

²³Musyirifah, *Al-Qada*, h. 224.

menyelesaikan persoalan-persoalan perlakuan tidak adil atau penganiayaan yang dilakukan pejabat pemerintah terhadap rakyat, umpamanya pajak terlalu tinggi, penyitaan harta dengan tidak sah, dan sebagainya.²⁴

Untuk di daerah-daerah, kekuasaan peradilan itu dibagi tiga komposisi, yaitu:

- a. Inspektur (al-Muftisy)
- b. Hakim (al-qadi)
- c. Wakil hakim (Nuwab al-qadi).²⁵

Hukum materil yang digunakan oleh peradilan-peradilan dan /atau lembaga kehakiman tersebut adalah hukum-hukum fiqh dari mazhab Imam Abu Hanifah sebagai mazhab resmi yang berlaku di kerajaan Turki Usmani.²⁶ Peradilan-peradilan dengan perbedaan-perbedaan kewenangan tersebut berlaku dan terdapat pula untuk tingkat daerah dalam kekuasaan yurisdiksi Turki Usmani.

2. Peradilan Islam Sesudah Tandhimat (1839-1924 M).

Tandhimat adalah suatu masa (periode) penggalakan peraturan-peraturan dan perundangan di Kerajaan Turki Usmani dalam rangka pembaharuan. Tokoh-tokoh pembaharu pada masa ini adalah Mustafa Rasyid Pasha dan Mehmed Sadik Rif'at Pasya. Keberhasilan perjuangan tokoh-tokoh ini ditandai dengan

²⁴ Harun Nesution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, I (Jakarta: U.I. Press, 1978) h. 116.

²⁵ Musyrifah, *Al-Qada*, h. 227.

²⁶ *Ibid.* h. 224.

ditetapkannya Hatt-i Syarif Gulhane (Piagam Gulhane) pada tanggal 3 Nopember 1839 M sebagai dasar tandhimat. Dasar-dasar perubahan itu itu adalah:

- a. Terjaminnya ketentraman hidup, harta dan kehormatan warga negara.
- b. Peraturan mengenai pemungutan pajak.
- c. Peraturan mengenai kewajiban dan lemahnya dinas militer.

Oleh karena itu setelah Piagam Gulhane ditetapkan, berturut-turut undang-undang dan peraturan-peraturan yang berdasar pada piagam itu bermunculan. Pada tahun 1840 ditetapkan Undang-Undang Hukum Pidana yang di dalamnya memuat anti korupsi. Pada tahun 1847 didirikan mahkamah-mahkamah baru untuk urusan pidana dan sipil, dan pada tahun itu juga didirikan Bank Usmani dengan langkah pertamanya mengganti mata uang dengan yang baru yang memakai sistem desimal. Pada tahun 1850 ditetapkanlah Undang-undang Hukum Dagang yang bersumber dari hukum dagang Perancis.

Kerajaan Turki Usmani yang pada waktu itu kalah dari pihak Eropa, didesak oleh Bangsa Eropa untuk mengeluarkan aturan-aturan yang menjamin persamaan hak antara rakyat yang beragama Islam dengan rakyat yang tidak beragama Islam, terutama yang berasal dari Eropa. Atas desakan itu maka pada tahun 1856 diumumkan lagi satu piagam baru Hatt-I Humayun (Piagam Humayun).

Isi pokok dari piagam ini adalah di samping menguatkan piagam Gulhane juga pembaharuan status warga negara non muslim dengan adanya jaminan kebebasan beragama dan beribadat serta kesempatan-kesempatan untuk menduduki jabatan pemerintah tidak hanya diberikan berdasarkan pada penganutan agama, bahasa dan ras yang bersangkutan.

Setelah lahirnya piagam tersebut, berturut-turut ditetapkan undang-undang sebagai berikut:

1. Tahun 1858 undang-undang hukum tanah
2. Tahun 1858 undang-undang hukum pidana, yang diambil dari hukum pidana Perancis dan Itali
3. Tahun 1861 undang-undang pokok peradilan dagang
4. Tahun 1863 undang-undang hukum laut
5. Tahun 1883 undang-undang hukum acara perdata
6. Tahun 1906 undang-undang eksekuti²⁷

Di tengah-tengah lahirnya beberapa undang-undang tersebut, pada tahun 1876 tersusun himpunan undang-undang hukum perdata. Himpunan undang-undang ini dibentuk/disusun dalam satu buku kitab undang-undang hukum perdata yang diberi nama *al-Majallah al-Ahkam al-Adliyah*. Materi dalam kitab undang-undang tersebut pada umumnya diambil dari kitab-kitab *Dhahir al-Riwayah* madzhab Hanafi. Jika terdapat perbedaan pendapat antara ulama-ulama Hanafiyah, baik yang tertuang dalam kitab-

²⁷Shabhi Mahmasani, *Falsafah al-Tasyri' fi al-Islam*, alih bahasa Ahmad Sujono (Bandung: al-Ma'arif, 1977) h. 69.

kitab tersebut maupun dalam praktek sehari-hari, maka yang diambil adalah pendapat yang dipandang lebih sesuai dan cocok dengan keadaan, waktu, dan kepentingan atau kemashalatan umum.

Secara sistematis, *al-Majallah al-Ahkam al-Adiliyah* itu dibagi ke dalam 16 bab, yaitu; 1. tentang jual beli (*al-buyu'*), 2. tentang sewa-menyewa/perburuhan (*al-ijarah*), 3. tentang tanggungan (*kafalah*), 4. tentang pemindahan hutang piutang (*al-hiwalah*), 5. tentang gadai (*al-rahn*), 6. tentang titipan (*amanat*), 7. tentang hibah, 8. tentang rampasan dan pengrusakan (*al-gasab* dan *al-italaf*), 9. tentang pengampuan, pemaksaan dan hak beli dengan paksa (*al-hajr*, *al-ikrah*, *al-syuf'ah*), 10. tentang syarikat dagang, 11. tentang perwakilan (*wakalah*), 12. tentang perdamaian dan pembebasan hak (*al-sulh wa al-ibrah*), 13. tentang pengakuan, 14. tentang gugatan, 15. tentang pembuktian dan sumpah (*al-bayyinah wa al-tahlif*), 16. tentang peradilan, pemeriksaan di pengadilan (*qada*).²⁸

Selain kitab *al-Majallah al-Ahkam al-Adliyah* yang merupakan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, kemudian pada tahun 1918 dikeluarkan pula Undang-undang Keluarga (*Qanun al-Ailat*). Undang-undang ini dikhususkan untuk masalah-masalah perkawinan dan putusny perkawinan. Sumber materilnya bukan

²⁸ A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h. 219-220.

hanya dari fiqh-fiqh mazhab Hanafi, tetapi juga dari sumber-sumber lain termasuk hukum Eropa.

Dikeluarkannya berbagai undang-undang menunjukkan bahwa hukum-hukum di Kerajaan Usmani sangat beragam apalagi di masa terakhir kerajaan. Untuk menampung berlakunya undang-undang tersebut, jenis-jenis peradilan juga berkembang, apalagi soal-soal agama yang ditetapkan pada piagam Humayun. Persamaan dan toleransi beragama mewujudkan pula lahirnya peradilan untuk warga negara yang tidak beragama Islam. Lalu berkembang pulalah peradilan-peradilan yang dipimpin hakim-hakim non muslim.²⁹ Sehingga pada masa itu terdapat Pengadilan Islam, Pengadilan Campuran, Pengadilan Orang-orang Pribumi, Pengadilan Agama non-Islam, Pengadilan Ekstra Teritorial.³⁰

Terlihat pula dalam perkembangan hukum dan perundang-undangan di Kerajaan Turki Usmani, bahwa hukum Islam semakin tersisih oleh politik sekularisme, sampai pada klimaksnya dihapuskannya sistem khalifah dalam pemerintahan oleh Majelis Nasional Agung pimpinan Mustafa Kemal Attartuk pada tahun 1924, bahkan sebelum itu pada tahun 1922, Sultan Turki Usmani terakhir, Muhammad IV (Wahiduddin), tidak berperan lagi sebagai khalifah dalam lapangan politik. Dengan

²⁹Hasbi Ash-Shiddiqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Bandung: al-Ma'arif, 1964) h. 26.

³⁰*Ibid.*

terhapusnya sistem khalifah, maka berakhirlah kerajaan Turki Usmani berubah menjadi Republik Turki seperti sekarang ini.

A. Sejarah Peradilan Agama

Peradilan Agama di Indonesia memiliki sejarah yang amat panjang, dimulai dari masuknya Islam ke negeri ini, zaman kerajaan-kerajaan Islam, zaman Kolonial Belanda hingga ke zaman kemerdekaan, peradilan ini telah eksis meskipun dengan bentuk dan sistem yang berbeda-beda.¹ Eksistensi peradilan ini terutama untuk menangani sengketa yang terjadi di antara umat Islam pada zaman yang masing-masing, sehingga terwujud kehidupan umat Islam sebagai bagian dari kehidupan bangsa dan negara yang sejahtera, aman, tertib dan tertib melalui penegakan keadilan, kebenaran dan sikap bertanggung jawab yang mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Sebagai milik bangsa Indonesia, Islamnya yang beragama Islam, Peradilan Agama lahir, tumbuh dan berkembang bersama bangsa Indonesia, kehadiran agama Islam, keadilannya untuk sangat diperlukan untuk menegakkan hukum dan keadilan bersama dengan lembaga peradilan lainnya. Peradilan Agama telah memberikan andil yang cukup besar kepada bangsa Indonesia pada abad ini, khususnya bagi umat Islam sejak Islam berada di bumi pertiwi ini.

¹ Daniel S. Lee, *Islamic Courts in Indonesia* (Tejerasan HA, Zain Noe, Peradilan Agama Islam di Indonesia), (Jakarta: Intermedia, 1983), h. 5.

BAB IV PERADILAN AGAMA DI INDONESIA

A. Sejarah Peradilan Agama

Peradilan Agama di Indonesia memiliki sejarah yang amat panjang, dimulai dari masuknya Islam ke negeri ini, zaman kerajaan-kerajaan Islam, zaman Kolonial Belanda hingga ke zaman kemerdekaan, peradilan ini telah eksis meskipun dengan bentuk dan sistem yang berbeda-beda.¹ Eksistensi peradilan ini terutama untuk menangani sengketa yang terjadi di antara umat Islam pada zamannya masing-masing, sehingga terwujud kehidupan umat Islam sebagai bagian dari kehidupan bangsa dan negara yang sejahtera, aman, tenteram dan tertib melalui penegakan keadilan, kebenaran dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.

Sebagai milik bangsa Indonesia, khususnya yang beragama Islam, Peradilan Agama lahir, tumbuh dan berkembang bersama tumbuh dan berkembangnya bangsa Indonesia, kehadirannya mutlak sangat diperlukan untuk menegakkan hukum dan keadilan bersama dengan lembaga peradilan lainnya. Peradilan Agama telah memberikan andil yang cukup besar kepada bangsa Indonesia pada umumnya, khususnya bagi umat Islam sejak Islam berada di bumi persada ini.

¹Daniel S. Lev, *Islamic Courts in Indonesia* (Terjemahan HA. Zaini Noeh, *Peradilan Agama Islam di Indonesia*), (Jakarta: Intermedia, 1985), h. 5.

Di bawah ini akan dipaparkan sejarah Peradilan Agama sebelum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

1. Peradilan Agama Sebelum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Peradilan Agama dalam bentuk yang dikenal seperti sekarang ini sudah ada sejak Islam pertama kali masuk ke bumi Indonesia ini. Peradilan Agama berkembang seiring dengan berkembangnya kelompok masyarakat pada waktu itu, kemudian perkembangan selanjutnya memperoleh tempat dalam kerajaan-kerajaan Islam, seperti kerajaan di Aceh, Banten, Mataram, Demak dan sebagainya. Hal ini dapat dimaklumi sebab jabatan Qodhi dalam Syari'at Islam merupakan alat kelengkapan dalam pelaksanaan syari'at.

Dalam suatu kelompok masyarakat, jabatan hakim dapat dilakukan dengan cara *tahkim*, yakni menunjuk seorang hakim jika mereka berselisih pendapat dan dapat pula dengan cara *bai'at* oleh *ahlul hilli wal a'qdi*, yakni pengangkatan atas seorang yang dipercaya oleh majelis, orang-orang terkemuka dalam masyarakat, sedangkan dalam suatu negara yang berpemerintahan, pengangkatan dalam jabatan hakim dilaksanakan dengan *tauliyah*, yakni pemberian kuasa dari penguasa untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai hakim. Ketika Islam masuk ke Indonesia pada abad ke VII, mereka membentuk kelompok masyarakat Islam yang selanjutnya menjadi kerajaan Islam, kebanyakan berada di pesisir utara Pulau Jawa. Dalam perkembangan selanjutnya mereka membutuhkan lembaga peradilan yang dapat

² Ditulis oleh Departemen Agama, *Kerang-Kerangan Sejarah Peradilan Agama* (Jakarta: CV. Ade Cahya, 1985), h. 5.

menyelesaikan segala persoalan dan persengketaan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.²

Pada awalnya pemerintahan Kolonial Belanda, tidak begitu memperhatikan urusan penyelesaian sengketa antara penduduk pribumi di Pengadilan Agama. Pada waktu itu pemerintah kompeni hanya mengurus urusannya sendiri, tetapi setelah pemerintahan penjajah ini kuat, mereka mengadakan pemisahan antara peradilan keduniawian (*wereldlijke rechtspraak*) yang dilakukan oleh pengadilan *Gubernemen*, dengan Peradilan Agama yang dibiarkan tumbuh dalam masyarakat dengan tanpa pembinaan sama sekali, selanjutnya berangsur-angsur dikurangi kewenangan dan kekuasaannya.

Campur tangan pertama kali oleh pemerintah penjajah Belanda dalam soal Peradilan Agama dimulai tahun 1820, pada saat itu pemerintah penjajah Belanda menginstruksikan kepada seluruh Bupati di Jawa Madura agar perselisihan mengenai waris antara orang-orang Islam supaya diserahkan kepada para ulama Islam untuk menyelesaikannya, instruksi ini dikenal dengan *regenten instructie*.

Kemudian dalam Stbl. 1835 Nomor 58 dinyatakan lebih tegas lagi tentang wewenang Pengadilan Agama di Jawa dan Madura, yaitu menyelesaikan segala perselisihan tentang perkawinan dan pembagian harta benda yang menurut pandangan masyarakat harus diputus menurut hukum Islam, orang yang memutus perkara tersebut

² Ditbintertais Departemen Agama, *Kenang-Kenangan Seabad Pengadilan Agama* (Jakarta: CV. Ade Cahya, 1985), h. 8.

harus orang yang ahli hukum Islam. Tetapi jika terjadi persengketaan dari pembagian harta benda atau pembayaran sejumlah uang yang terjadi karena putusan itu, maka perselisihan itu harus diselesaikan di pengadilan biasa. Pengadilan biasa tersebut memeriksa perkara dengan memperlihatkan keputusan hakim agama. Putusan tersebut harus dijalankan oleh penguasa pada pengadilan biasa yang memutuskan perkara tersebut.

Baik dalam *Regenten Instructie 1820* maupun dalam Stbl. 1835 Nomor 58 yang kemudian dirubah dengan Stbl. 1884 dan 1854 hanya menyebutkan penyerahan penyelesaian perkara perkawinan dan sengketa harta benda pada orang yang ahli hukum Islam (*Priesters*), yaitu para penghulu serta pejabat agama Islam lainnya yang pada waktu itu menjadi pembantu Bupati. Jadi Peradilan Agama belum lahir yang diatur dalam peraturan tersendiri, kehadiran Peradilan Agama merupakan kebutuhan dari umat Islam dalam rangka melaksanakan Syari'at Islam sebagai agama yang dianut.³

Usaha Raja Belanda untuk membentuk Peradilan Agama di daerah jajahannya baru dilaksanakan pada tahun 1882. Pada waktu itu pemerintah Belanda mengeluarkan Keputusan Nomor 24 tanggal 19 Januari 1882, dimuat dalam Stbl. 1882 Nomor 152 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Peraturan ini dikenal dengan "*Bepaling betreffende de priesterraden op Java dan Madoera*" dan untuk singkatnya disebut dengan Stbl. 1882 Nomor

³ Abdul Manan, *Hukum Islam Dalam Berbagai Wacana* (Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003), h. 17.

152. Keputusan Raja Belanda resmi diberlakukannya mulai tanggal 1 Agustus 1882, dengan demikian pemerintah Belanda secara resmi mengakui keberadaan Peradilan Agama di daerah jajahannya.

Keputusan Raja Belanda dalam Stbl. 1882 Nomor 152 tersebut berisi 7 (tujuh) pasal, sebagai berikut:

1. Setiap *Landraad* (Pengadilan Negeri), maka diadakan pula Pengadilan Agama wilayah hukum yang sama dengan wilayah hukum *Landraad* tersebut;
2. Pengadilan Agama terdiri atas penghulu yang diperbantukan pada *Landraad* sebagai ketua, sedikitnya tiga orang anggota, sebanyak-banyaknya delapan orang anggota;
3. Pengadilan Agama tidak boleh mengambil keputusan jika tidak ada sedikitnya tiga orang anggota, termasuk ketua sendiri. Jika ada selisih pendapat, ketua yang akan menentukan putusannya;
4. Keputusan-keputusan Pengadilan Agama harus dinyatakan dalam surat yang memuat pertimbangan-pertimbangan dan alasan secara singkat serta ditandatangani oleh anggota-anggota yang hadir, begitu pula dicatat biaya yang berpekara;
5. Kepada kedua belah pihak yang berperkara harus diberikan salinan Surat Keputusan yang ditandatangani Ketua Majelis yang menyidangkan perkaranya;
6. Keputusan-keputusan Pengadilan Agama harus dimuat dalam register, dan register tersebut setiap tiga bulan sekali harus disampaikan kepada daerah setempat untuk memperoleh penysaksian padanya;

7. Keputusan Pengadilan Agama yang melampaui batas kekuasaannya atau tidak memenuhi ketentuan tersebut dalam point dua, tiga dan empat di atas maka keputusan tersebut dinyatakan tidak berlaku.⁴

Meskipun Peradilan Agama telah dibentuk secara resmi sebagai lembaga peradilan yang mempunyai kedudukan dan kewenangan seperti tersebut di atas, namun kenyataannya pemerintah Belanda tidak memperlakukan Peradilan Agama seperti lembaga peradilan yang lain. Pemerintah Belanda tidak menyediakan anggaran belanja dan gaji untuk aparat yang bertugas di Pengadilan Agama, segala keperluan Pengadilan Agama harus dicukupkan dari ongkos perkara saja. Pejabat yang diberi gaji hanya Ketua Pengadilan saja, itupun dalam kedudukannya sebagai "*adviseur bij de landraad*" atau sebagai penasehat pada *landraad*.

Pelaksanaan Stbl. 1882 Nomor 152 yang disempurnakan dengan Stbl. 1909 Nomor 128 dan Stbl. 1926 Nomor 232 memperoleh beberapa perubahan yang prinsipil, sehingga menimbulkan kekecewaan pada kalangan hukum Islam dan juga di kalangan umat Islam sendiri.⁵ Kekecewaan para ahli hukum Islam tersebut karena beberapa alasan, di antaranya: (1) Memang betul para anggota Pengadilan Agama tidak mendapat gaji tetap, hal ini dikarenakan para anggota Pengadilan Agama tidak mempunyai

⁴ Departemen Agama RI, *Kebijaksanaan Departemen Agama di Indonesia* (Jakarta: Balitbang Depag, 1996), h. 74.

⁵ HZA. Noeh dan HA. Basith Adnan, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), h. 42.

keahlian dalam bidang hukum Islam dan pengetahuan lainnya. Orang-orang yang dipandang cakap dan alim, serta ahli dalam bidang hukum Islam tidak bersedia diangkat menjadi Pegawai Negeri, (2) Di antara Pengadilan Agama ada yang memungut ongkos perkara sebesar 10% (dikenal istilah '*usyur*') dari harta waris yang diselesaikannya dan sering sekali taksiran mengenai '*usyur*' itu terlalu tinggi. Terhadap masalah ini sangat memberatkan umat Islam itu sendiri dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapinya, (3) Tidak ada instansi yang lebih tinggi untuk mengadakan banding (*apple*) atas suatu putusan yang dirasakan oleh para pihak tidak puas atau tidak adil. Selama ini cara yang ditempuh adalah dengan cara memohon kepada Gubernur Jenderal dengan perantara *Adviseur Voor Inlandsche Zaken* agar putusan yang kurang puas/memuaskan itu dibatalkan, tetapi permohonan itu jarang sekali dikabulkan oleh Gubernur Jenderal tersebut, (4) Dan karena putusan Pengadilan Agama harus diminta *Executor Verklaring* dari *Landraad*, dengan hal ini timbul proses peradilan ganda yang mengakibatkan ongkos perkaranya menjadi tambah mahal.

Atas desakan masyarakat dan para ahli hukum untuk menyelesaikan persoalan tersebut di atas, maka dengan keputusan Raja Belanda tertanggal 12 Januari 1922 Nomor 54 dibentuk panitia yang diberi nama "*Priesterraden Commissie*" yang bertugas untuk menyelidiki keadaan Pengadilan Agama dan mengatasi hal-hal yang dianggap perlu, serta menyampaikan saran-saran kepada pemerintah Belanda tentang perbaikan Pengadilan Agama di masa yang akan

datang. Setelah panitia ini bekerja selama empat tahun lamanya, maka pada tahun 1926 panitia ini menyampaikan hasil kerjanya kepada pemerintah Belanda berupa laporan yang memuat usul-usul dan saran-saran tentang perbaikan bagi Pengadilan Agama di Jawa dan Madura.

Berdasarkan usul dan saran *Priesterraden Commissie* tersebut, maka pada tahun 1931 dengan ordonansi tanggal 31 Januari 1931 Stbl. 1931 Nomor 53 Pemerintah Belanda menetapkan peraturan tentang Pengadilan Agama meliputi 3 (tiga) pokok ketentuan, yakni:

- (1) Bagian 1 tentang Peradilan Agama yang berisikan: *pertama*; bentuk Pengadilan Agama sebagai "*Priesterraad*" dirubah menjadi "*Penghoeloe Gerecht*" yang terdiri atas seorang penghulu sebagai hakim, di samping dua penasehat dan seorang penitera, *kedua*; kekuasaan Pengadilan Agama dibatasi hanya memeriksa perkara-perkara yang bersangkutan dengan nikah, thalak dan rujuk. Sedangkan masalah-masalah waris, wakaf dan hadhonah dicabut dari kewenangan Pengadilan Agama, dan selanjutnya diserahkan kepada *Landraad*, *ketiga*; diadakan beberapa tambahan tentang acara pada Pengadilan Agama, *keempat*; diadakan Mahkamah Agung Islam Tinggi sebagai Peradilan Tingkat Banding terhadap putusan Pengadilan Agama.
- (2) Bagian 2 tentang campur tangan *Landraad* di Jawa dan Madura terhadap pengangkatan wali atas harta benda orang-orang Indonesia.

(3) Bagian 3 pembentukan wali peninggalan harta bagi bangsa Indonesia di bawah pengawasan *Landraad*.⁶

Dalam perkembangan lebih lanjut, dengan Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 9 tanggal 19 Pebruari 1937, Stbl. 1937 Nomor 116 dikeluarkan suatu peraturan yang merubah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama, karena dianggap selama ini kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama terlalu luas. Pembatasan wewenang ini sebenarnya akibat dari lahirnya teori *receptie* yang dipelopori oleh Snouck Hurgronje, Van Vollen Hoven, Ter Haar dan pengikut-pengikutnya.

Kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan peraturan baru tersebut di atas, yaitu: *pertama*, memeriksa perselisihan antara suami istri yang beragama Islam, terutama hal-hal yang menyangkut tentang nikah, thalak dan rujuk. *Kedua*, memeriksa dan memutus perkara perceraian, menyatakan syarat ta'lik telah berlaku atau telah memenuhi syarat sehingga jatuh thalak dapat ditetapkan. *Ketiga*, memeriksa dan memutus perkara-perkara tentang gugat nafkah, mas kawin yang belum dibayar oleh pihak suami, serta hak-hak bekas istri yang dicerai seperti nafkah iddah, uang mut'ah dan nafkah yang masih terutang.

Di samping pembatasan wewenang Pengadilan Agama sebagaimana tersebut di atas, pemerintah Belanda juga menghapus kedudukan ketua Pengadilan Agama sebagai penasehat *Landraad*

⁶ Departemen Agama RI, *Kebijaksanaan Departemen Agama di Indonesia*, h. 74.

yang ditetapkan berdasarkan Pasal 7 R.O. Sebagaimana diketahui bahwa kedudukan ketua Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 7 R.O. tersebut merupakan penasehat *Landraad* dan kedudukannya sangat penting, kedudukan itu dianggap sangat perlu oleh pemerintah Belanda. Dengan lahirnya peraturan tentang pembatasan kewenangan Pengadilan Agama, maka kedudukan penasehat itu dihapus dan dianggap tidak perlu lagi serta sangat memalukan. Pada akhirnya kedudukan penghulu c.q. hakim Peradilan Agama hanya sebagai juru sumpah saja.

Sebagai realisasi dari Stbl. 1931 Nomor 53 tanggal 31 Januari 1931 tentang penetapan peraturan atas dasar usul-usul, dan saran-saran *Priesterraden Commissie*, maka pada tahun 1938 berdasarkan Stbl. 1937 Nomor 610 bertepatan dengan tanggal 1 Januari 1938 dibentuk Mahkamah Islam Tinggi untuk daerah Jawa dan Madura. Sedangkan peraturan pelaksanaannya berupa penambahan dari Pasal 7 Stbl. 1882 Nomor 152. Kekuasaan dari Mahkamah Islam Tinggi dibagi dua bidang, yaitu: (1) memutuskan perselisihan tentang kekuasaan antara Pengadilan Agama yang dimintakan Banding oleh yang bersangkutan, (2) berkewajiban untuk memberikan saran-saran pertimbangan masalah agama apabila diminta oleh Gubernur Jenderal atau pembesar Negara lainnya.

Tujuan pembentukan Mahkamah Islam Tinggi adalah untuk mengawasi pelaksanaan Peradilan Agama dalam melaksanakan tugasnya, dengan demikian diharapkan akan membawa kesatuan dan kepastian hukum dalam masalah nikah, thalak dan rujuk. Juga

diharapkan oleh pemerintah Belanda agar Mahkamah Islam Tinggi dapat memberikan saran-saran dalam pembuatan undang-undang.

Tindakan pemerintah Belanda yang mengurangi kekuasaan Pengadilan Agama dalam masalah waris, wakaf, hadhonah dan sebagainya, ternyata mendapat reaksi keras dari umat Islam. Sedangkan pembentukan Mahkamah Islam Tinggi pada umumnya dapat diterima dengan segala senang hati oleh umat Islam. Reaksi keras datangnya dari kalangan penghulu dan pegawainya sebagai pihak yang terkena langsung akibat dari Stbl. 1937 Nomor 116 tersebut. Berdasarkan pada peraturan itu pula para penghulu dan pegawainya membentuk Perhimpunan Penghulu dan Pegawai (PPDP). Dalam kongres pertama di Kota Surabaya pada tanggal 16 Mei 1937, diputuskan perlunya ada permohonan yang disampaikan kepada pemerintah Belanda agar Stbl. 1937 Nomor 116 supaya segera dicabut kembali.

Berdasarkan Stbl. 1937 Nomor 638 dan Nomor 639 pemerintah Belanda membentuk pula Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan dan Timur, kecuali Pulau Laut, Tanah Bumbu dan Hulu Sungai. Untuk tingkat pertama disebut Kerapatan Qadhi, dan untuk tingkat banding disebut Kerapatan Qadhi Besar. Kekuasaan Pengadilan Agama tersebut meliputi wilayah Banjarmasin, Marabahan, Martapura, Plaihari, Rantau, Kandangan, Negara, Barabai, Amuntai dan Tanjung. Sedangkan kewenangan Kerapatan Qadhi Besar sama seperti kewenangan Mahkamah Islam Tinggi di Jawa dan Madura. Pada prinsipnya Peradilan Agama yang dibentuk berdasarkan Stbl.

1937 Nomor 638 dan Nomor 639 itu sama dengan Peradilan Agama yang ada di Jawa dan Madura. Letak bedanya hanya pada landasan hukum berdirinya saja.

Pada zaman Jepang berkuasa, penguasa Jepang secara menyeluruh merubah politik yang merendahkan Islam sebagaimana yang telah dilakukan oleh pemerintah Belanda. Jepang memberikan penghargaan kepada umat Islam dengan harapan umat Islam bersedia mendukung perjuangan kemakmuran Asia Timur Raya. Sebagai tindak lanjut dari politik penguasa Jepang tersebut maka dibentuk Kantor Agama Pusat yang dinamakan "*Shumubu*" dan untuk kantor agama daerah (Tingkat Keresidenan) dinamakan "*Shuumuka*". Sejalan dengan adanya usaha pemerintah Jepang membentuk PETA (Pembela Tanah Air), maka kantor-kantor agama itu merupakan tempat latihan militer dan persiapan diri penyelenggaraan birokrasi keagamaan di kemudian hari, di mana tokoh-tokoh Islam seperti K.H. Abdul Hasyim dan K.H. Abdul Kahar Mudzakir banyak berperan. Kedua tokoh ini mewakili tugas K.H. Hasyim Asy'ari yang disebut sebagai *Shumubucho* pada akhir pemerintahan Jepang.⁷

Meskipun pemerintah Jepang secara lahiriah memberikan penghargaan kepada umat Islam di bekas penjajahan Belanda, tetapi khusus tentang kedudukan korps penghulu yang dibentuk pada zaman penjajahan Belanda dahulu belum dianggap sebagai pegawai negeri oleh pemerintah Jepang, tetap tidak diberi gaji dan dibiarkan hidup

⁷ HZA. Noeh dan HA. Basith Adnan, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama*, h. 35.

tanpa ada pembinaan sama sekali. Jepang tetap menganggap penghulu itu sebagai pegawai bantuan bagi Pengadilan Negeri. Sebenarnya anggapan itu sangatlah keliru sebab pada waktu itu penghulu sudah mempunyai kedudukan sebagai Kepala Pencatat Nikah, Imam Masjid, Penasehat Bupati dan Ketua Pengadilan Agama yang seharusnya diberi gaji sebagaimana pegawai negeri lainnya.

Dari uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Peradilan Agama sebelum kemerdekaan, kekuasaannya kadangkala berbenturan dengan Peradilan Umum. Hal ini memang disengaja oleh pemerintah Belanda, sebab sejak semula sangat khawatir terhadap perkembangan hukum Islam, sebab hukum Islam selain bertentangan dengan agama mereka, juga merupakan hukum yang sebahagian besar dianut oleh bangsa Indonesia. Bagi pemerintah Belanda, memberi hak hidup kepada hukum Islam, berarti sama saja memberi peluang hidup bagi bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Setelah Indonesia merdeka bangsa Indonesia sadar terhadap politik hukum Kolonial Belanda itu yang anti kepada hukum Islam, tahap demi tahap politik hukum Belanda itu ditinggalkan oleh bangsa Indonesia.

2. Peradilan Agama Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dilaksanakan tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik permulaan perubahan dalam segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia, dan sebagai realisasi dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa, atas desakan Komite Nasional

Indonesia Pusat dan atas dasar usul dari utusan Komite Nasional Indonesia Pusat daerah Banyumas Jawa Tengah, pemerintah menyetujui dibentuknya Departemen Agama pada tanggal 3 Januari 1946.

Sewaktu berdirinya Negara Indonesia Pengadilan Agama dimasukkan ke dalam Kementerian Kehakiman, kemudian setelah pembentukan Departemen Agama pada tanggal 3 Januari 1946 tersebut, Pengadilan Agama dipindahkan ke Departemen Agama dengan Penetapan Pemerintah Nomor 5/SD tanggal 25 Mei 1946. Mahkamah Islam Tinggi yang sebelumnya juga berada di bawah Departemen Kehakiman dipindahkan ke Departemen Agama berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor 5/SD tanggal 25 Maret 1946. Mulai saat itu pembinaan Pengadilan Agama menjadi tanggung jawab Departemen Agama.

Langkah-langkah yang diambil oleh Departemen Agama sehubungan dengan penetapan pemerintah tersebut yaitu mengeluarkan Maklumat Menteri Agama II tanggal 23 April 1946 yang isinya sebagai berikut: (1) *Shuumuka* yang pada zaman Jepang berada di Keresidenan dan saat itu menjadi Jabatan Agama Daerah, menjadi urusan Departemen Agama Pusat. (2) Hak untuk mengangkat Penghulu *Landraad*, penghulu beserta dua anggotanya yang pada saat itu berada di tangan residen, diserahkan kepada Departemen Agama Pusat. (3) Hak untuk mengangkat penghulu mesjid dan pegawai-pegawainya yang sebelumnya menjadi wewenang Bupati, diserahkan kepada Departemen Agama Pusat. (4)

Ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Nikah, Talak dan Rujuk pada tanggal 22 November 1946 untuk mengganti *Ordonantie* Pencatat NTR sebelumnya. Untuk menindak lanjuti undang-undang tersebut, maka dikeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1947 tanggal 8 Desember 1947 tentang pemisahan tugas dan fungsi penghulu kabupaten sebagai pegawai pencatat nikah dan urusan kepenghuluannya lainnya dengan penghulu hakim yaitu Ketua Pengadilan Agama sebagai Qadhi Hakim Syar'i.

(5) Berdasarkan penetapan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 1958 maka dibentuk 11 kantor Pengawas Pengadilan Agama yang kedudukannya berdampingan dengan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah provinsi di luar Jawa Madura, Jakarta, Semarang dan Surabaya. Selanjutnya dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1963 jo. Nomor 47 Tahun 1963 Lembaga Pengawasan Pengadilan Agama itu dirubah menjadi Inspektorat Pengadilan Agama. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya Lembaga Inspektorat ini dihapus, dan tugas-tugasnya dimasukkan ke Pengadilan Agama Tingkat Banding.

(6) Menunjuk 13 buah buku rujukan sebagai pedoman hakim agama dalam mengadili perkara, yaitu *Al-Bajuri*, *Fatkhul Mu'in*, *Syakawi Alattahrir*, *Qulyubi/Mahalli*, *Fatkhul Wahhab* dengan sarahnya, *Tuhfah*, *Taqribul Mustaq*, *Qawanin Syari'ah Lilsayyid Shadaqah Dahlan*, *Syamsuri Fil Fara'id*, *Bughyatul Murtasyidin*, *Al-Fiqh 'Ala Mazahibil Arba'ah* dan *Mugnil Muhtaj*.⁸

⁸ Abdul Manan, *Hukum Islam dalam Berbagai Wacana*, h. 24

Di luar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan dikenal berbagai macam lembaga Pengadilan Agama, tetapi lembaga tersebut merupakan bahagian dari Peradilan Adat dan Peradilan Swapraja.⁹ Lembaga peradilan tersebut terlihat dalam bentuk-bentuk sebagai berikut: (1) Di daerah Negara bekas Sumatera Timur telah dikenal adanya Majelis Agama Islam yang menyelesaikan perselisihan antara umat Islam. Majelis ini dibentuk berdasarkan Ketetapan Wali Negara Nomor 35 tanggal 1 Agustus 1950, kemudian surat keputusan Wali Negara ini dikuatkan dengan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1953 yang tetap mengakui Majelis Agama itu sebagai Pengadilan Agama dan diberi wewenang selain NTR juga masalah kewarisan, wakaf dan hibah menurut hukum Islam. (2) Mahkamah Syari'ah juga terdapat di daerah Aceh, Tapanuli Selatan, Sumatera Tengah, Riau, Jambi, Lampung, Palembang dan sekitarnya. Pembentukannya dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 1946, sesuai dengan pengakuan Wakil Pemerintah Pusat Darurat di Pematang Siantar melalui surat kawat tertanggal 13 Januari 1947. (3) Daerah Bengkulu, Pontianak dan sekitarnya dalam mengadili perselisihan antara umat Islam telah ada Mahkamah Balai Agama. Demikian juga di daerah Sumbawa, Sulawesi dan sebagian Kalimantan Timur sudah ada Mahkamah Penyelesaian Sengketa bagi umat Islam.

Peradilan tersebut tetap diperkenankan menjalankan tugasnya dengan kewenangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 12 Stbl. 1932

⁹ Anwar Sitompul, *Kewenangan dan Tata Cara di Pengadilan Agama* (Armico: Bandung, 1984), h. 13.

Nomor 80. Usaha-usaha yang telah dilakukan Departemen Agama dalam rangka mendirikan Pengadilan Agama di luar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan baru berhasil pada tahun 1950. pada mulanya Departemen Agama mengajukan usul untuk pembentukan Pengadilan Agama di Aceh, ternyata usul tersebut disetujui oleh Pemerintah Pusat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957 tanggal 6 Agustus 1957. Melihat prospek baik ini, maka Departemen Agama memajukan lagi usul pembentukan Pengadilan Agama di daerah-daerah yang dianggap perlu. Dalam sidang kabinet tanggal 26 Agustus 1957 Pemerintah Pusat menyetujui usul tersebut dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tanggal 5 Oktober 1957.¹⁰

Kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957, yaitu:

1. Mengadili perkara dari suami istri yang beragama Islam apabila timbul sengketa dalam rumah tangganya;
2. Menyelesaikan perkara dalam bidang nikah, thalak, rujuk, fasakh dan syiqaq;
3. Menetapkan syarat taklik thalak yang diperjanjikan telah terujud karena adanya gugatan pihak istri;
4. Mengadili gugatan nafkah dan mahar yang belum dibayar;

¹⁰ Departemen Agama RI., *Kebijaksanaan Departemen Agama di Indonesia*, h. 78.

5. Mengadili perkara hadhanah, waris mal waris, wakaf, hibah dan shadaqah, serta perkara perselisihan dalam mengelola baitul mal.¹¹

Kalau dibandingkan pada Pengadilan Agama di Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan dengan kewenangan Pengadilan Agama yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957, maka terlihat bahwa Pengadilan Agama yang dibentuk berdasarkan PP lebih luas kewenangannya.

Pada tahun 1948, setelah penyerahan kedaulatan dilaksanakan dan kembali kepada Negara kesatuan pada tahun 1950, pemerintah mengadakan usaha ke arah kesatuan dalam bidang hukum dan peradilan secara menyeluruh. Langkah awal dari usaha ini adalah dikeluarkannya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1950 tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan, susunan, dan acara Pengadilan Agama. Pasal 1 ayat (1) sub a dan b yang menyatakan bahwa Peradilan Adat dan Swapraja dihapus, sedangkan Peradilan Agama yang ada dalam Peradilan Adat dan Swapraja jika menurut huklum yang hidup dalam masyarakat masih diperlukan, maka Peradilan Agama tersebut tidak ikut dihapus, tetap diperkenankan menjalankan tugasnya dan selanjutnya akan diatur dengan peraturan pemerintah secara tersendiri.

Setiap rancangan memuat aturan-aturan hukum tentang kekuasaan kehakiman yang akan dibuat di Indonesia sesuai yang dikehendaki oleh Pasal 24 dan 25 UUD 1945, selalu saja ada

¹¹ Abdul Manan, *Hukum Islam dalam Berbagai Wacana*, h. 26.

pendapat-pendapat yang menghendaki agar Pengadilan Agama dihapus seperti Peradilan Adat atau Desa, atau dimasukkan ke dalam Pengadilan Negeri sehingga merupakan bagian dari Pengadilan Negeri, akan tetapi pendapat-pendapat tersebut selalu saja dapat terkalahkan dan muncul pikiran sehat yang menghendaki agar Pengadilan Agama tetap dipertahankan sebagai kekuasaan kehakiman yang berdiri sendiri.

Dalam rancangan undang-undang susunan dan kekuasaan kehakiman tahun 1947 yang pembuatan rancangan tersebut dipimpin oleh Wirjono Prodjodikoro telah ditetapkan bahwa Pengadilan Agama harus tetap ada sebagai lembaga kekuasaan kehakiman di samping lembaga kekuasaan kehakiman yang lain, demikian juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 disebut juga bahwa Pengadilan Agama tetap dipertahankan keberadaannya. Kemudian ketika membicarakan rencana undang-undang tentang perkawinan di DPR banyak pula pendapat yang bermaksud menghapus Pengadilan Agama ini. Tetapi setelah rancangan undang-undang tentang perkawinan itu disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kedudukan Pengadilan Agama bertambah kuat. Puncaknya kontroversi tentang Pengadilan Agama ini terjadi ketika RUU tentang Peradilan Agama dibahas di DPR, yang pada akhirnya lahirlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.¹²

¹² Departemen Agama RI, *Kebijaksanaan Departemen Agama di Indonesia*, h. 77.

Untuk sampai pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut bukanlah suatu hal yang mudah, tetapi memerlukan jalan yang panjang untuk meraihnya yaitu dengan mempersiapkan kondisi-kondisi yang tepat untuk menghapus dampak negatif dari pandangan hukum Kolonial Belanda kepada Pengadilan Agama yang sudah sangat berakar di Indonesia. Mengenai hal ini telah banyak yang dilakukan usaha yang positif oleh para hakim yang tergabung dalam Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ketika merumuskan konsep tentang kekuasaan kehakiman yang akan diajukan kepada Konstituante untuk dijadikan dasar dalam pembuatan Undang-Undang Dasar. Pimpinan Pusat IKAHI memasukkan juga Lembaga Peradilan Agama sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia, di samping lembaga kekuasaan kehakiman lainnya. Konsep tersebut diterima secara bulat oleh komisi yang menangani bagian hukum di Konstituante tersebut. Sebelum UUD selesai dibuat, Konstituante dibubarkan dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959.

Meskipun Konstituante dibubarkan, gagasan agar Pengadilan Agama tetap eksis dimunculkan lagi dalam bentuk yang lain, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Dalam kedua undang-undang ini dikemukakan bahwa Peradilan Agama tetap dipertahankan, kemudian undang-undang ini dihapus dan dibentuk undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam peraturan perundang-

undangan yang terakhir ini dikemukakan bahwa lembaga kekuasaan kehakiman itu dilaksanakan oleh empat peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Walaupun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 telah berlaku dan menyebut adanya empat lingkungan peradilan, akan tetapi bertahun-tahun setelah itu soal Peradilan Agama seakan-akan dibiarkan saja, sehingga pengaturan tentang Peradilan Agama dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut seolah-olah hanya sekedar tulisan di atas kertas saja. Bahkan juga tidak ada tindak lanjut pengaturannya walaupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 begitu jelas mengokohkan eksistensi Pengadilan Agama. Kemudian pada Tahun 1977 dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1977 Mahkamah Agung mengambil inisiatif memberikan dasar hukum bagi tugas-tugas kehakiman dari Peradilan Agama, dengan membuka jalan untuk pengajuan perkara-perkara kasasi ke Mahkamah Agung bagi putusan-putusan tingkat banding dari Peradilan Agama. Maka pada hakikatnya PERMA Nomor 1 Tahun 1977 itu merupakan pengakuan secara yustisial bahwa Pengadilan Agama sejajar dengan Pengadilan Umum dan Pengadilan Tentara.

Dalam perkembangan lebih lanjut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 1976 tanggal 16 Desember 1976, Departemen Agama membentuk cabang Mahkamah Islam Tinggi di Surabaya dan Bandung sehubungan dengan banyaknya perkara banding karena berlaku aktifnya Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Cabang Mahkamah Islam Tinggi Bandung mempunyai tugas untuk menyelesaikan perkara-perkara banding yang berasal dari Pengadilan Agama di Jawa Barat dan DKI Jakarta, sedangkan Cabang Agama Islam Tinggi di Surabaya mempunyai tugas menyelesaikan perkara-perkara banding yang berasal dari Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara. Pembentukan kedua cabang Mahkamah Islam Tinggi tersebut hanya bersifat sementara, karena untuk membentuk pengadilan banding yang definitif harus dengan undang-undang.

Pada tahun 1985 Menteri Agama dengan Surat Keputusan Nomor 61 Tahun 1985 memindahkan kembali Mahkamah Islam Tinggi dari Surakarta ke Ibukota Jakarta. Selanjutnya membentuk satu buah lagi cabang MIT di Semarang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 107 tanggal 12 Juli 1986.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua cabang Mahkamah Islam Tinggi tersebut secara resmi diakui sebagai Pengadilan Tingkat Banding dan mempunyai kedudukan sama dengan Pengadilan Tingkat Banding dalam lingkungan pengadilan yang lain.

Kemudian Departemen Agama menyeragamkan sebutan Badan Peradilan Agama dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1980. karena kebutuhan yang mendesak, tindakan Menteri Agama tersebut dapat dimaklumi oleh Mahkamah Agung. Sejak dikeluarkannya keputusan ini, maka sebutan terhadap

Pengadilan Agama adalah Pengadilan Agama untuk tingkat pertama, yang sebelumnya mempunyai nama yang bervariasi yaitu Pengadilan Agama untuk Jawa Madura, Kerapatan Qodhi untuk Kalimantan Selatan dan Mahkamah Syari'ah untuk luar Jawa Madura dan Kalimantan Selatan. Sedangkan untuk Pengadilan Tingkat Banding diberi sebutan dengan Pengadilan Tinggi Agama. Sebelumnya adalah Mahkamah Islam Tinggi untuk Jawa Madura, Kerapatan Qodhi Besar untuk Kalimantan Selatan, dan Mahkamah Syari'ah Provinsi untuk daerah lainnya.

Pertimbangan filosofis ditetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah:

1. Bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram dan tertib;
2. Bahwa untuk mewujudkan tata kehidupan tersebut dan menjamin persamaan kedudukan warga Negara dalam hukum diperlukan upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat;
3. Bahwa salah satu upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum tersebut adalah melalui Peradilan Agama sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;

4. Bahwa pengaturan tentang susunan, kekuasaan dan hukum acara pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang selama ini masih beraneka ragam karena didasarkan pada: *Pertama*, peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Stbl. 1882 Nomor 152 dihubungkan dengan Stbl. 1937 Nomor 116 dan 610). *Kedua*, peraturan tentang Kerapatan Qodhi dan Kerapatan Qodhi Besar untuk sebagian residensi Kalimantan Selatan dan Timur (Stbl. 1937 Nomor 638). *Ketiga*, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Peradilan Agama/Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura (LN 1957 Nomor 99) perlu segera diakhiri demi terciptanya kesatuan hukum yang mengatur Peradilan Agama dalam kerangka sistem dan tata hukum nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
5. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut dan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dipandang perlu menetapkan undang-undang yang mengatur susunan, kekuasaan dan hukum acara pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.¹³

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dijelaskan bahwa kedudukan Pengadilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam. Kedudukan Peradilan Agama adalah sejajar dengan lembaga peradilan lain yang ada di Indonesia ini. Kemudian tentang

¹³ Abdul Manan, *Hukum Islam dalam Berbagai Wacana*, hal. 34.

kewenangan Peradilan Agama dijelaskan dalam Pasal 49 yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat shadaqah dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama berwenang mengadili perkara-perkara yang jadi tugas dan kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding, juga berwenang menyelesaikan sengketa yuridiksi antara Pengadilan Agama.

Dengan diberlakukannya undang-undang tentang Peradilan Agama, maka saat ini Pengadilan Agama telah mempunyai hukum yang kuat sebagai lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia. Karena itu diharapkan Pengadilan Agama akan lebih mantap dalam menjalankan tugasnya, sejajar dengan lembaga peradilan lainnya sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka keberadaan Pengadilan Agama semakin kokoh dan mandiri. Tanggung jawab dan kekuasaan Peradilan Agama semakin besar, sebab undang-undang ini tidak hanya mencantumkan eksistensi lembaga Peradilan Agama saja, tetapi juga menjamin kewenangan lembaga Peradilan Agama untuk melaksanakan putusannya sendiri, yang sebelumnya dilaksanakan oleh lembaga Peradilan Umum.

Langkah selanjutnya yang diambil oleh Mahkamah Agung berkenaan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah mengeluarkan Surat Edaran Nomor

2 Tahun 1990 tentang petunjuk yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dalam mengeluarkan surat asli, salinan atau turunan penetapan atau putusan, risalah, akta atau surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara yang diperiksa dan diputusnya tidak diperkenankan lagi menggunakan cap dinas yang berisi kata-kata Departemen Agama dan Nomor Induk Pegawai (NIP) di bawah nama terang Ketua, Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita atau Jurusita Pengganti. Setelah itu Mahkamah Agung aktif mengadakan pembinaan terhadap sumber daya manusia yang ada di Peradilan Agama, terutama pembinaan para hakim yang menyangkut bidang pemahaman terhadap ilmu hukum dan pemahaman terhadap ilmu syari'ah, agar mampu menjadi hakim dalam *court of law*.

B. Hukum Acara Peradilan Agama

Peradilan Agama adalah sebutan resmi bagi salah satu di antara empat lingkungan Peradilan Negara atau Kekuasaan Kehakiman yang sah di Indonesia. Tiga lingkungan Peradilan Negara lainnya adalah Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Peradilan Agama adalah salah satu di antara tiga Peradilan Khusus di Indonesia. Dua Peradilan Khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam hal ini, Peradilan Agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu saja, bukan

pidana dan pula halnya untuk orang-orang Islam di Indonesia, dalam perkara-perkara perdata Islam tertentu, tidak mencakup seluruh perdata Islam.

Peradilan Agama adalah Peradilan Islam di Indonesia, sebab dari jenis-jenis perkara yang ia boleh mengadilinya, seluruhnya adalah jenis perkara menurut agama Islam. Dirangkaikannya kata-kata "Peradilan Islam" dengan kata-kata "di Indonesia" adalah karena jenis perkara yang ia boleh mengadilinya tersebut tidaklah mencakup segala macam perkara menurut Peradilan Islam secara universal. Tegasnya, Peradilan Agama adalah Peradilan Islam limitatif, yang telah disesuaikan dengan keadaan di Indonesia.

Sebagaimana sudah disebutkan bahwa Peradilan Agama adalah peradilan perdata, sedangkan Peradilan Umum adalah juga peradilan perdata di samping peradilan pidana. Jadi, dilihat dari segi asas-asas hukum acara, tentu ada prinsip-prinsip kesamaannya secara umum di samping secara khusus tentu ada pula perbedaan antara Hukum Acara Perdata Peradilan Umum dan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama.

Segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan negara maupun dari syari'at Islam yang mengatur bagaimana cara orang bertindak ke muka Pengadilan Agama dan juga mengatur bagaimana cara Pengadilan Agama tersebut menyelesaikan perkaranya, untuk mewujudkan hukum materiil Islam yang menjadi kekuasaan Peradilan Agama.

Mengenai hukum acara Peradilan Agama disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 54 yang berbunyi: "*Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini*".

Menurut Pasal 54 di atas, Hukum Acara Peradilan Agama sekarang bersumber kepada dua aturan, yaitu yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi inti Hukum Acara Perdata Peradilan Umum, antara lain:

1. HIR (*Het Herziene Inlandsche Reglement*) atau disebut juga RIB (Reglemen Indonesia yang di Baharui);
2. RBg (*Rechts Reglement Buitengewesten*) atau disebut juga Reglemen untuk Daerah Seberang, maksudnya untuk luar Jawa-Madura;
3. Rsv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*) yang zaman jajahan Belanda dahulu berlaku untuk *Raad van Justitie*;
4. BW (*Burgerlijke Wetboek*) atau disebut juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Eropa;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.¹⁴

¹⁴ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 21.

Peraturan perundang-undangan tentang acara perdata yang sama-sama berlaku bagi lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan dan Pelaksanaannya.

Kemudian perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama tidak disinggung mengenai hukum acara. Maka ketentuan mengenai hukum acara masih tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak mengalami perubahan.

Perubahan yang dilakukan adalah mengenai penambahan kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dalam Pasal 49 disebutkan bahwa kewenangan Peradilan Agama adalah:

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- c. Wakaf dan shadaqah.

Selanjutnya dirubah berdasarkan UU. Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49, menjadi: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi syari'ah.

Dengan demikian ada penambahan kewenangan, yakni zakat, infaq dan ekonomi syari'ah. Kemudian dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juga mengalami perubahan-perubahan, yakni:

Pertama, mengenai Pengangkatan Anak, dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf a poin 20 dinyatakan "penetapan asal-usul seorang anak, penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam". Penyelesaian lebih luas dibanding penjelasan yang sama dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 huruf a poin 20. Penetapan asal-usul anak dengan perluasan penjelasan tersebut berarti bahwa pengangkatan anak juga masuk dalam wewenang Peradilan Agama. Tentu saja pengangkatan anak tersebut berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam hukum

Islam yang berbeda dengan ketentuan pengangkatan anak dalam BW atau hukum perdata umum.

Kedua, mengenai Kewarisan, dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dikenal adanya asas pilihan hukum. Dalam penjelasannya dinyatakan “bidang kewarisan adalah mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut”. Para pihak berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan. Asas pilihan hukum ini dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dihapus. Ini terlihat dalam penjelasannya yang berbunyi “dalam kaitannya dengan perubahan undang-undang ini pula, kalimat yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyatakan para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan dinyatakan dihapus”. Dengan dihapusnya pilihan hukum, maka dengan demikian sengketa tentang warisan antara orang-orang yang memeluk agama Islam tidak dapat lagi menggunakan hukum lain selain hukum Islam dan hanya dapat dilakukan melalui Peradilan Agama.

Ketiga, mengenai Zakat. Salah satu kewenangan tambahan yang cukup signifikan adalah dimasukkannya zakat dalam kewenangan Peradilan Agama. Dalam penjelasan huruf f Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dinyatakan “zakat adalah

harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh seorang muslim dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Keempat, mengenai Infaq dan Shadaqah. Salah satu perluasan kewenangan lainnya adalah tentang infaq yang dibedakan dengan shadaqah. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf g dinyatakan "infak adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rizki (karunia) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah Swt. Sedangkan shadaqah dijelaskan pada huruf h, "shadaqah adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan suka rela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharapkan ridho Allah swt. dan pahala semata.

Kelima, mengenai Ekonomi Syari'ah. Dalam penjelasan Pasal 49 huruf I Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan "yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah antara lain meliputi: Bank Syari'ah, Lembaga Keuangan Syari'ah, Asuransi Syari'ah, Reasuransi Syari'ah, Reksadana Syari'ah, Obligasi Syari'ah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syari'ah, Sekuritas Syari'ah, Pembiayaan Syari'ah, Pegadaian Syari'ah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah, dan Bisnis Syari'ah.

Keenam, Sengketa Objek yang Terkait. Dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dinyatakan “dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan pengadilan umum”. Pasal ini dirubah sehingga menjadi:

1. Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa-sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;
2. Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Dengan demikian mengenai Hukum Acara Peradilan Agama tetap masih mengacu pada Pasal 54 UU. Nomor 7 Tahun 1989 yang menyatakan: “hukum acara yang berlaku di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini”.

Hal ini menegaskan bahwa dalam UU. Nomor 3 Tahun 2006 tidak merubah mengenai hukum acara atau mengatur mengenai hukum acara Peradilan Agama yang baru. Maka ketetapan hukum

acara pada Peradilan Umum masih tetap berlaku untuk Peradilan Agama termasuk hal-hal yang menjadi kewenangan baru Peradilan Agama sebagaimana disebutkan di atas sebagai akibat perluasan kewenangan melalui UU. Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Prinsip-prinsip Hukum Acara Peradilan Agama, dan dengan penjelasan relevan Hukum Acara Peradilan Islam dengan Hukum Acara Peradilan Agama. Mengingat penjelasan tentang relevansi Hukum Acara Peradilan Islam dengan Hukum Acara Peradilan Agama ini, akan dijelaskan prinsip-prinsip secara terpisah dari keseluruhan prinsip-prinsip Hukum Acara Peradilan Islam ke yang relevan dan yang tidak dengan sesama masyarakat muslim Indonesia.

A. Prinsip-Prinsip Hukum Acara Peradilan Islam

Tentang prinsip-prinsip ini dikutip riwayat Umar yang dikirimkannya kepada Abu Musa al-A'ay'ani (Abdullah ibn Qais) tentang pedoman dan dasar-dasar pengadilan bagi para hakim.

Umar ibn al-Khattab lahir di Mekkah 13 tahun setelah kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Dari segi silsilah ia mempunyai pertemuhan dengan silsilah Rasull pada leluhurnya tingkat ke-7 pada seorang yang bernama Ka'ab.

Ada dua peristiwa masa mudanya yang menarik perhatian Rasull, yaitu pertama, pengalamannya sebagai pengembal ternak unta, di masa ini ia diperlakukan keras oleh ayahnya al-Khattab, yang berpengaruh terhadap perkembangan mentalitasnya untuk menjadi seorang yang keras dan tegak. Kedua, pengalamannya bermain yang

BAB V

RELEVANSI HUKUM ACARA PERADILAN ISLAM DENGAN HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

Uraian dalam bab ini dimulai dari penjelasan tentang prinsip-prinsip (asas-asas) Hukum Acara Peradilan Islam, lalu diikuti dengan penjelasan prinsip-prinsip Hukum Acara Peradilan Agama, dan diakhiri dengan penjelasan relevansi Hukum Acara Peradilan Islam dengan Hukum Acara Peradilan Agama. Mengenai penjelasan tentang relevansi Hukum Acara Peradilan Islam dengan Hukum Acara Peradilan Agama ini, akan dijelaskan prinsip-prinsip mana sajakah dari keseluruhan prinsip-prinsip Hukum Acara Peradilan Islam itu yang relevan dan yang tidak dengan suasana masyarakat muslim Indonesia.

A. Prinsip-Prinsip Hukum Acara Peradilan Islam

Tentang prinsip-prinsip ini dikutip risalah Umar yang dikirimkannya kepada Abu Musa al-Asy'ari (Abdullah ibn Qais) tentang pedoman dan dasar-dasar mengadili bagi para hakim.

Umar ibn Khattab lahir di Mekkah 13 tahun setelah kelahiran rasulullah Muhammad SAW. Dari segi silsilah ia mempunyai pertemuan dengan silsilah Rasul pada leluhurnya tingkat ke-7 pada seorang yang bernama Ka'ab.

Ada dua peristiwa masa mudanya yang menarik perhatian Rasul, yaitu: pertama, pengalamannya sebagai pengembala ternak unta, di masa ini ia diperlakukan keras oleh ayahnya al-Khattab, yang berpengaruh terhadap perkembangan mentalitasnya untuk menjadi seorang yang keras dan tegas. Kedua, pengalamannya berniaga yang

terbilang sukses telah mempengaruhi kepribadiannya menjadi seorang yang cerdas, peka dengan situasi, faham akan tabiat dan karakteristik seseorang.¹

Al-Khattab adalah nama dari anggota terkemuka suku Quraisy yang berasal dari bani 'Adi. Ia pemberani, sehingga pada suatu kali dalam perang Fajr yang terjadi antara suku Quraisy dengan suku lainnya, ia mendapat julukan seorang bintang perang. Sifat ini mengalir kepada putranya Umar yang bertubuh tinggi besar, dadanya lebar, raut mukanya simpatik dan menarik, tangan dan kakinya kekar, suaranya jelas, nyaring dan lantang, bila berjalan langkahnya mantap, berwibawa dan gerakannya cepat. Bila sedang berada dalam perkumpulan, maka ia akan segera terlihat karena kekhasannya, baik sifat maupun fisiknya yang memungkinkan ia memiliki bidang yang dipersyaratkan.²

Umar lahir dari bani 'Adi ini, yaitu suatu kabilah minoritas yang tidak kaya tetapi menonjol dalam bidang ilmu dan intelegensia, karenanya sejak kakeknya, kabilah ini sering dipercaya untuk menghakimi perselisihan antara kabilah yang terjadi pada suku Quraisy. Kehormatan yang dimiliki bani 'Adi yang terbilang minoritas ini ternyata banyak mengundang iri dari kabilah lain, karenanya mereka sering berada dalam keterjepitan, Semua situasi ini

¹Amiur Nuruddin, *Ijtihad Umar ibn al-Khattab*, (Jakarta: Rajawali Press, 1987), h. 2-4.

²Sulaiman Muhammad al-Thahawi, *Umar ibn Khattab wa al-Usul al-Siyasah wa al-Iradat al-Hadisah: Dirasat al-Muqaranah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1976), h. 24.

telah turut menempa mentalitas Umar, mentalitas yang tertempa dengan keadilan dan benci terhadap kezaliman, dan sifat ini lebih sempurna lagi setelah diisi dengan ajaran Islam.³

Perpaduan bakat, firasat, kecerdasan, dan ilham Allah yang dimilikinya telah melahirkan seorang yang tangguh, dia adalah seorang yang telah mengungkap niat jahat Umair ibn Wahab ketika datang ke Medinah untuk membunuh Rasul, setelah niat jahatnya gagal karena Rasul telah terlebih dahulu diberi tahu, maka Umair pun masuk Islam. Hal ini mengandung hikmah baginya, di mana ia menjadi orang yang sering bersama Rasul dalam pembentukan syari'at. Contohnya adalah: menjadikan maqam Nabi Ibrahim menjadi mushalla, turunnya ayat Hijab, turunnya ayat Khamar, dan turunnya ayat yang melarang orang melakukan shalat kepada jenazah orang munafiq.⁴ Sejalan dengan hal tersebut, Rasul pernah mengatakan:

ان الله جعل الحق على لسان عمر و قلبه

Artinya: sesungguhnya Allah telah menjadikan kebenaran pada lidah dan hati Umar.

لو كان يعدى نبي لكان عمر بن الخطاب

Artinya: seandainya masih ada sesudahku Nabi niscaya itu adalah Umar ibn al-Khattab.⁵

Selanjutnya, pada masa Abu Bakar, Umar telah punya gagasan yang gemilang, yang dampaknya turut kita rasakan sampai sekarang

³Ibid. h. 42-43; Amiur Nuruddin, *Ijtihad Umar ibn al-Khattab*, h. 9.

⁴Ibid. h. 41.

⁵Amiur Nuruddin, *Ijtihad Umar ibn al-Khattab*, h. 10-11.

ini, yaitu tentang pembukuan al-Quran. Kendatipun pada mulanya Abu Bakar enggan untuk melakukannya, tetapi berkat kemampuan Umar untuk meyakinkan akhirnya Abu Bakar setuju dengan usaha tersebut, maka al-Quran pun dibukukan.

Pada saat menjelang akhir hayat Abu Bakar, Abu Bakar telah menjadi suksesor Umar supaya dia memangku jabatan kekhalifahan, karena Abu Bakar berkeinginan untuk mewariskan kursi kekhalifahan tersebut kepada Umar. Hal ini dilakukannya karena kepercayaannya terhadap Umar, dibanding dengan sahabat-sahabat lainnya. Dengan upaya ini Umar pun dapat diantarkannya menjadi Khulafa al-Rasidin yang ke-2.

Kisah pengangkatan Umar ini telah melahirkan keluhan beberapa sahabat yang memperlihatkan kekhawatiran mereka terhadapnya karena ketegasan dan kekerasannya. Hal ini secara nyata terlihat dari tampilnya Thalhah ibn Ubaidillah sebagai juru bicara mereka yang secara langsung mengajukan keluhan kepada Abu Bakar, terlihat dalam ungkapanannya:

ما انت قائل لربك اذا سألَكَ عن نِسْخِ خَلاَفِكَ عَمْرٍا عَلَيْنَا وَقَدْ رَأَيْتَ مَا يَلْقَى النَّاسُ

منهُ وَاَنْتَ مَعَهُ فَكَيْفَ بِهِ اِذَا خَلَا بِهِمْ بَعْدَ لِقَائِكَ رَبِّكَ

Artinya: bagaimana engkau menjawab terhadap Tuhanmu ketika engkau ditanya tentang sikapmu mengangkat Umar menjadi khalifah terhadap kami, padahal engkau telah mengetahui tentang apa yang diketahui manusia terhadapnya, karena engkau bersamanya, maka bagaimana denganmu setelah menjumpai Tuhanmu karena engkau bersendirinya mengangkatnya.

Ternyata kepribadian Umar ibn al-Khattab yang khas tersebut, setelah ia menjadi khalifah telah mengukir sejarah tersendiri dalam pemerintahannya, ia telah berkuasa dalam masa yang lama, dan mencatat berbagai keberhasilan, di antaranya menciptakan pemerintahan yang aman dan damai, serta mampu memperluas daerah kekuasaan Islam sampai keluar dari Semenanjung Arabia.

Demikianlah profil Umar ibn Khattab, adapun risalah yang dikirimkannya kepada Abu Musa al-Asy'ari itu adalah tatkala ia menjadi khalifah, sebagai pedoman dan dasar-dasar mengadili bagi para hakim di daerah kekuasaannya (kekuasaan Islam) yang kala itu telah meluas sampai keluar Semenanjung Arabia.

Pada masa ini masih dikenal adanya hakim-hakim yang diangkat atas swadaya masyarakat, terutama pihak yang bertikai. Tampaknya keputusan hakim ini di samping kurang mengikat, juga kurang berwibawa. Hal ini tercantum dari peristiwa Abu Musa sebagai hakim, lalu Umar menegurnya karena ia belum diangkat secara resmi untuk menjadi hakim oleh khalifah, sebagai berikut:

ان بلغنا انك تقضي ولست بأمر قال بلى قال عمر قول حارما من ثولى قارما

Artinya: Kami menjumpaimu memutus perkara padahal engkau bukanlah seorang amir, dia menjawab, hal itu betul. Umar berkata: berpalinglah akan hal yang dilarang dari perbuatan yang berlebihan.

Untuk memenuhi kebutuhan hukum umat Islam secara umum, dan untuk menghilangkan hakim-hakim swadaya masyarakat secara bertahap, maka khalifah mulai menyediakan hakim-hakim yang

independen yang diangkat secara resmi dan formal oleh Umar di setiap daerah wilayah kekuasaannya. Dengan hal ini diharapkan akan tercipta keseragaman hukum dan pengadilan.

Sejalan dengan hal tersebut, untuk menciptakan hakim-hakim yang profesional di bidangnya, maka Umar menulis surat kepada hakim-hakim tersebut tentang pedoman dan dasar-dasar untuk mengadili. Satu di antara surat itu adalah surat yang dikirimkannya kepada Abu Musa al-Asy'ari yang dikenal paling monumental dan dikenal sampai saat ini.

Selengkapnya risalah Umar yang dikirimkannya kepada Abu Musa al-Asy'ari itu adalah:

بسم الله الرحمن الرحيم

. من عمر أمير المؤمنين إلى عبدالله بن قيس، السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
 أما بعد: فإن القضاء فريضة محكمة وسنة منبوعة، فأفهم إذا ادلى اليك وانفذ إذا تبين لك
 فإنه لا ينفع تكلم لا نفاذ له. أس الناس في مجلسك وفي وجهك وقضاءك حتى لا
 يطمع شريف في خيفك ولا بياس ضعيف من عدلك. الثبوت على المدعي واليمين
 على من أنكر. والصلح جاوز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ومن
 ادعى حقا غابا أو بينة فاضرب له أمدا ينتهي إليه فإن بينه أعطيته بحقه، وإن
 أعجزه ذلك استحللت عليه القضية فإن ذلك هو أبلغ للعذر وأجلى للعمى. ولا يمنعك
 قضا قضيت فيه اليوم فراجع فيه رأيك فهديت فيه لرشدك إن تراجع فيه الحق،
 فإن الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التماضي في الباطل. ثم الفهم
 فيما ادلى اليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا في سنة، ثم قاييس الأمور عند
 ذلك واعرف الأمثال ثم اعمد فم تری إلى أحبها إلى الله واشبهها بالحق والمسلمون
 عدول بعضهم على بعض الامجريا عليه شهادة زور أو مجلودافي حد أو ظنينا في

ولاء او قرابة فان الله تعالى تولى من العباد السر اعر وستر عليهم الحدود الايالات والايامن. وايك والغضب والقلق والضجر والتأذى بالناس والتكر عند الخصومة فان القضاء في موطن الحق مما يوجب الله به الأجر ويحسن به الذكر فمن خلصت نيته فيه الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس. ومن تزين بماليس في نفسه شانه الله فان الله تعالى لا يقبل من العباد الاماكان خالصا وماظنك بثواب عند الله في عاجل رزقه وخزاعن رحمته والسلام عليك ورحمة الله

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi penyayang

Dari Umar Amir al-Mukminin kepada Abdullah ibn Qais, keselamatan atasmu, dan rahmat serta keberkatanNya, adapun sesudahnya;

Sesungguhnya keberadaan peradilan itu adalah sesuatu hal yang fardu yang sudah ditetapkan hukumnya (*muhkam*), serta merupakan sunnah yang mesti diikuti. Maka pahamiilah setiap pengaduan yang dihadapkan kepadamu, putuskanlah apabila hal itu telah jelas bagimu, karena sesungguhnya tak bermanfaat pembicaraan tentang kebenaran belaka tanpa ada keputusan terhadapnya. Samaratakanlah manusia itu dalam majlismu, dalam pandanganmu, dan dalam keputusanmu sehingga orang mulia tidak tamak dengan kecuranganmu, dan orang lemah tidak putus asa dengan keadilanmu. Pembuktian diperlukan dari penggugat, sedang sumpah dibebankan kepada tergugat. Setiap perdamaian pada dasarnya adalah boleh, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Siapa yang menggugat hak terhadap sesuatu hak yang gaib atau yang nyata maka berikanlah baginya kesempatan yang memadai untuk membuktikan hal itu, lalu jika dia

mampu membuktikannya maka berikanlah hak tersebut kepadanya, dan jika dia lemah untuk membuktikannya maka ambillah hak tersebut dari padanya dengan keputusanmu, maka sesungguhnya yang demikian itu adalah lebih pantas baginya karena ketidakmampuannya untuk membuktikan dan lebih memperjelas terhadap sesuatu yang tersembunyi. Dan janganlah engkau terhalang dengan putusanmu yang telah ada hari ini sehingga engkau menarik putusanmu itu kembali, maka karena kecakapanmu engkau ditunjuki dengan keputusan itu untuk menariknya kembali, maka sesungguhnya kebenaran itu adalah qadim yang tidak dapat dibatalkan oleh sesuatu, dan kembali kepada kebenaran itu adalah lebih baik daripada selamanya bergelimang di dalam kebatilan. Kemudian pahamiilah sungguh-sungguh akan pemahaman terhadap sesuatu yang diajukan kepadamu tentang suatu kasus yang tidak dinyatakan di dalam al-Quran, juga tidak di dalam al-Sunnah, kemudian analogikanlah hal itu kepada hal yang ada di dalam keduanya, dan kenalilah persamaan-persamaannya, kemudian ambillah sesuatu yang lebih disukai Allah dan lebih mirip dengan kebenaran. Setiap orang Islam, antara sebagian dengan sebagian yang lain adalah adil, kecuali orang-orang yang sudah pernah menyampaikan sumpah palsu, atau sudah pernah dijatuhi hukuman had, atau orang yang diragukan asal-usulnya, maka sesungguhnya Allah Ta'ala lah yang menjadi wali dari setiap status, dan Allah menutupi hukuman-hukuman terhadap mereka, kecuali terhadap apa yang sudah jelas (baik jelas dengan pembuktian atau sumpah).

Jauhilah dirimu dari kemarahan, kekacauan pemikiran, perasaan tidak senang, menyakiti manusia, dan bersikap kasar dalam menyelesaikan perkara, maka sesungguhnya keputusan yang berada di tempat-tempat yang benar itu adalah sesuatu yang diwajibkan Allah pahalanya terhadapnya, dan menciptakan kebaikan opini masyarakat, maka siapa orang yang niatnya bersih terhadap kebenaran meskipun terhadap dirinya sendiri, niscaya Allah akan menciptakan kecukupan baginya terhadap sesuatu yang ada di antaranya dan di antara masyarakat, dan orang yang menghiasi dirinya dengan sesuatu yang tidak dimilikinya, niscaya Allah akan menjelekkannya, maka sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menerima hambaNya kecuali mereka yang tergolong tulus, dan apa yang engkau sangka dengan pahala yang ada di sisi Allah, terhadap rizki yang segera datangnya, dan yang tersembunyi dalam rahmatNya. Dan keselamatan serta rahmat Allah kepadamu.⁶

Risalah Umar ini meletakkan 10 prinsip peradilan, yakni:

1. Peradilan merupakan suatu lembaga yang sangat urgen di tengah-tengah masyarakat
Kedudukan lembaga peradilan di tengah-tengah masyarakat suatu negara, hukumnya wajib (sangat urgen) dan sunnah yang harus diikuti/dipatuhi. Wajibnya keberadaan lembaga ini

⁶Pagar, *Dasar-Dasar Peradilan di Indonesia: Analisis terhadap Risalah Umar ibn al-Khattab dan Relevansinya dengan Indonesia*, (makalah) h. 5-7; M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 89-91.

ditengah-tengah masyarakat terlihat dari kata *fardu* dalam awal risalah Umar yang mengatakan:

فان القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة

2. Memutuskan kasus setelah memahami duduk persoalan

Pahamilah duduk persoalan suatu kasus yang diajukan, dan ambillah keputusan setelah jelas persoalan mana yang benar dan mana yang salah. Sesungguhnya suatu kebenaran yang tidak memperoleh perhatian hakim akan menjadi sia-sia.⁷

3. Prinsip persamaan di hadapan hukum

Samakanlah pandangan kepada kedua belah pihak dan berlaku adillah. Dudukkanlah kedua belah pihak di majlis secara sama, pandang mereka dengan pandangan yang sama, agar orang yang terhormat tidak melecehkan, dan orang yang lemah tidak merasa teraniaya. Prinsip ini tercermin dari risalah Umar yang berbunyi:

أس الناس في مجلسك وفي وجهك وقضاءك حتى لا يطمع شريف في خيفك ولا
بياس ضعيف من عدلك

4. Kewajiban (beban) pembuktian

Penggugat wajib membuktikan gugatannya dan tergugat wajib membuktikan bantahannya (bersumpah). Kewajiban membuktikan dibebankan kepada penggugat sedang bersumpah kepada tergugat, sejalan dengan rasionalitas di mana setiap sesuatu itu dipahami sebagaimana apa adanya sebelum ada hal baru yang ditopang dengan bukti-bukti sah untuk mengubahnya,

h.92. ⁷M.Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*,

dan pemberlakuan sangka baik terhadap seseorang, serta tidak menyusahkan pemilik suatu hak atas hak tersebut. Dengan demikian pemilik hak tidak diwajibkan untuk membuktikan akan kepemilikannya terhadap hak tersebut. Hal ini terlihat jelas dalam risalah Umar, ia mengutip Hadis Rasul, lalu berkata:

البينة على المدعى واليمين على من أنكر

Artinya: Pembuktian diperlukan dari penggugat, sedang sumpah dibebankan kepada tergugat.⁸

5. Penyelesaian perkara melalui perdamaian

Penyelesaian perkara secara damai dibenarkan, sepanjang tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.⁹ Harus diketahui bahwa keputusan yang paling sempurna adalah keputusan yang diperoleh dari hasil perdamaian, karena keputusan seperti ini diperoleh lewat persetujuan kedua belah pihak yang bersengketa, tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang di antara mereka, tetapi keduanya sama-sama menang dan sama-sama kalah. Lembaga damai ini tercermin dari risalah Umar yang berbunyi:

الصلح جاعز بي

المسلمين الاصلحا احل حراما او حرم حلالا

⁸Ibid. (M. Fauzan), (Pagar), h. 9.

⁹Ibid. (M. Fauzan), h. 92

Artinya: Setiap perdamaian pada dasarnya adalah boleh, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.¹⁰

6. Peninjauan kembali suatu keputusan yang telah dijatuhkan

Apabila suatu perkara telah diselesaikan dengan baik, namun belakangan diketahui kembali bahwa di dalam keputusan itu terdapat kebatilan maka dapat dilakukan peninjauan kembali terhadap keputusan tersebut. Hal ini tercermin dari ungkapan Umar yang berbunyi: *ولا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم فرجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك ان تراجع فيه الحق , فان الحق قديم لا يبطله شيء ومراجعة الحق خير من التماضي في الاطلال*

Artinya: Dan janganlah engkau terhalang dengan putusanmu yang telah ada hari ini sehingga engkau menarik putusanmu itu kembali, maka karena kecakapanmu engkau ditunjuki dengan keputusan itu untuk menariknya kembali, maka sesungguhnya kebenaran itu adalah *qadim* yang tidak dapat dibatalkan oleh sesuatu, dan kembali kepada kebenaran itu adalah lebih baik daripada selamanya bergelimang di dalam kebatilan.¹¹

7. Hakim bersikap proaktif membantu para pihak (pencari keadilan)

demi terselenggaranya proses peradilan

Hakim sebagai pemimpin sidang dalam pemeriksaan perkara harus bersifat aktif dalam setiap upaya untuk mengungkapkan

¹⁰Pagar, *Dasar-Dasar Peradilan di Indonesia*, h. 9-10.

¹¹*Ibid.*, h. 10-11.

kebenaran, karenanya hakim dapat memberi bantuan kepada para pihak untuk terselenggaranya peradilan yang adil, jujur, sederhana, cepat dan biaya ringan. Kebolehan hakim memberikan bantuan ini tidak boleh dilakukan dalam rangka untuk memenangkan salah satu pihak, karena hakim itu mesti bersikap netral, sehingga cara bagaimana seseorang dapat mengutarakan pendapatnya di depan sidang dapat berjalan dengan baik. Hal ini tercermin dari risalah Umar yang berbunyi:

ومن ادعى حقا غابا او بينة فاضرب له امدا ينتهي اليه فان بينه اعطيته بحقه, وان اعجزه ذلك استحللت عليك القضية فان ذلك هو ابلغ للعدول واجلى للعمى

Artinya: Siapa yang menggugat hak terhadap sesuatu hak yang gaib atau yang nyata maka berikanlah kesempatan yang memadai baginya untuk membuktikan hal itu, lalu jika ia mampu membuktikannya maka berikanlah hak tersebut kepadanya, dan jika ia lemah untuk membuktikannya maka ambillah hak tersebut dari padanya dengan keputusanmu, maka sesungguhnya yang demikian itu adalah lebih pantas baginya karena ketidakmampuannya untuk membuktikan dan lebih memperjelas terhadap sesuatu yang tersembunyi.¹²

Dengan memahami redaksi kalimat: *maka berikanlah kesempatan yang memadai baginya untuk membuktikan hal itu*, adalah merupakan sikap hakim yang proaktif untuk membantu para pihak untuk dapat secara sempurna menyampaikan isi

¹²Ibid., h.. 11-12.

hatinya. Dengan sikap seperti ini diharapkan akan terungkap kebenaran yang sesungguhnya, atau yang paling mendekati.¹³

8. Kewajiban menggali hukum yang hidup dan melakukan penalaran logis

Pergunakanlah kekuatan logis dalam menyelesaikan perkara yang diajukan dengan menggali dan memahami hukum yang hidup, apabila hukum suatu perkara kurang jelas dalam al-Quran dan Sunnah. Kemudian bandingkanlah permasalahan tersebut satu sama lain dan ketahuilah (kenalilah) hukum yang serupa, kemudian ambillah mana yang lebih mirip dengan kebenaran.¹⁴

Memang sudah menjadi kenyataan bahwa tidak selamanya hakim itu akan menghadapi kasus yang sudah secara jelas dan tegas persoalannya dinyatakan di dalam al-Quran dan al-Hadis, karenanya bila hal ini terjadi maka hakim mesti lebih bersifat jeli untuk menemukan hukum yang akan diterapkan dalam kasus tersebut. Sejalan dengan hal ini Umar telah mengatakan dalam risalahnya: *ثم الفهم فيما ادلى اليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا في سنة، ثم قايس الامور عند ذلك واعرف الامثال ثم اعمد فيم ترى الى احبها الى الله واشبهها بالحق*

Artinya: Kemudian pahamiilah sungguh-sungguh akan pemahaman terhadap sesuatu yang diajukan kepadamu tentang suatu kasus yang tidak dinyatakan di dalam al-Quran, juga tidak

¹³Ibid., h. 12.

¹⁴M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, h.

di dalam al-Sunnah, kemudian analogikanlah hal itu kepada hal yang ada di dalam keduanya, dan kenalilah persamaan-persamaannya, kemudian ambillah sesuatu yang lebih disukai Allah dan yang lebih mirip dengan kebenaran.¹⁵

9. Pada prinsipnya setiap orang dapat bertindak menjadi saksi

Pada prinsipnya setiap orang itu diduga baik, karenanya mereka boleh menjadi saksi, kecuali orang-orang tertentu yang telah terbukti ketidakadilannya. Hal ini tercermin dari ungkapan Umar dalam risalahnya yang berbunyi: *والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجرباً عليه شهادة زور أو مجلوداً في حد أو ظنيماً في ولاء أو قرابة فإن الله تعالى تولى من العباد السراير وستر عليهم الحدود الأباليينات والإيمان*

Artinya: Setiap orang Islam, antara sebagian dengan sebagian yang lain adalah adil, kecuali orang-orang yang sudah pernah dijatuhi hukuman had, atau orang yang diragukan asal-usulnya, maka Allah Ta'alalah yang menjadi wali dari setiap status, dan Allah menutupi hukuman-hukuman terhadap mereka, kecuali terhadap apa yang sudah jelas.¹⁶

10. Larangan bersidang ketika sedang emosional

Kebenaran adalah suatu hal yang ingin ditegakkan lewat pengadilan, karenanya hakim mesti bersifat tulus untuk menyelesaikan setiap perkara hanya demi menegakkan kebenaran. Sejalan dengan hal itu, dilarang bagi hakim untuk menangani suatu kasus di kala khawatir akan adanya faktor dan

¹⁵ Pagar, *Dasar-Dasar Peradilan di Indonesia*, h. 13.

¹⁶ *Ibid.*, h. 14.

interes tertentu yang mempengaruhi netralitasnya, maka hakim dilarang menangani kasus pada saat marah, pikiran kacau, dan hati yang tidak tenteram, serta yang lainnya. Hal ini seperti diungkapkan oleh Umar dalam risalahnya yang berbunyi: **وَأَيُّكَ وَالْغَضَبِ وَالْقَلَقِ وَالضُّجُرِ وَالْثَأْدَى بِالنَّاسِ وَالتَّكْرُّ عِنْدَ الْخُصُومَةِ فَإِنَّ الْقَضَاءَ فِي مَوَاطِنِ الْحَقِّ مِمَّا يُوجِبُ اللَّهُ بِهِ الْإِجْرَ وَيُحَسِّنُ بِهِ الذِّكْرَ فَمَنْ خَلَصَتْ نِيَّتُهُ فِي الْحَقِّ وَلَوْ عَلَى نَفْسِهِ كَفَاهُ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ تَرَيَنَّ بِمَا لَيْسَ فِي نَفْسِهِ شَأْنَهُ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعِبَادِ إِلَّا مَا كَانَ خَالِصًا وَمَا ظَنَّاكَ بِثَوَابٍ عِنْدَ اللَّهِ فِي عَاجِلِ رِزْقِهِ وَخِزَائِنِ رَحْمَتِهِ**

Artinya: Jauhilah dirimu dari kemarahan, kekacauan pemikiran, perasaan tidak senang, menyakiti manusia, dan bersikap kasar dalam menyelesaikan perkara, maka sesungguhnya keputusan yang berada di tempat-tempat yang benar itu adalah sesuatu yang diwajibkan Allah pahala terhadapnya, dan akan menciptakan kebaikan masyarakat, maka siapa orang yang niatnya bersih terhadap kebenaran meskipun terhadap dirinya sendiri, niscaya Allah akan menciptakan kecukupan baginya terhadap sesuatu yang ada di antaranya dan di antara masyarakat, dan siapa orang yang menghiasi dirinya dengan sesuatu yang tidak dimilikinya, niscaya Allah akan menjelekkaninya, maka sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menerima hambaNya kecuali mereka yang tergolong tulus, dan apa yang engkau sangka dengan pahala yang

ada di sisi Allah, terhadap rizki yang segera datang, dan yang tersembunyi dalam rahmatNya.¹⁷

B. Prinsip-Prinsip Hukum Acara Peradilan Agama

Sekedar menegaskan kembali bahwa penjelasan berikut ini adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip Hukum Acara Perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, sebab sebagaimana ditentukan Pasal 54 Undang-Undang Peradilan Agama bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Peradilan Agama. Prinsip-prinsip itu adalah:

1. Dalam lingkungan Peradilan Umum

Terdapat beberapa prinsip (asas) peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, yang dikenal dengan istilah Asas-Asas Peradilan Yang Baik (*Algemene Beginselen van Beheerlijk Rechtspraak*) atau Asas-Asas Hukum Acara Yang Baik (*Algemene Beginselen Behoorlijk Procesrecht*), yakni:

- a. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka
- b. Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata

¹⁷*Ibid.*, h. 14-15.

Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004). Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan Kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004).

- b. Proses peradilan dilakukan dengan mengatasnamakan Ketuhanan Yang Maha Esa
 Dalam semua lingkungan peradilan yang ada di Indonesia, proses peradilan harus dilakukan dengan mengatasnamakan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pencerminkan dari prinsip ini, setiap putusan pengadilan dimulai dengan kalimat: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004).
- c. Proses peradilan diselenggarakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan
 Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004). Yang dimaksud dengan sederhana adalah acara yang

dijalankan jelas, mudah difahami dan tidak berbelit-belit. Cepat maksudnya mengacu kepada jalannya proses peradilan yang tidak lamban. Biaya ringan maksudnya biaya yang tidak berat (banyak) sehingga semua lapisan masyarakat yang ingin memperoleh keadilan mampu menanggung biaya yang dibebankan. Biaya perkara yang tinggi dapat menyebabkan pihak yang berperkara tidak mau menggunakan media peradilan untuk mengajukan tuntutan hak mereka.

- d. Hakim mengadili kedua belah pihak yang berperkara (*Horen van beide partijen*)
Peradilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004). Hakim harus memperlakukan kedua belah pihak yang berperkara dalam kapasitas yang sama, tidak memihak, dan mendengar keterangan dari kedua belah pihak. Kedua belah pihak harus diberikan kesempatan yang sama untuk didengar keterangan atau pendapatnya. Hal ini juga bermakna bahwa pengajuan alat bukti harus dilakukan di muka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak (Pasal 132 a, 121 ayat (2) HIR, 145 ayat (2), 157 RBg, 47 Rv).
- e. Pengadilan tidak boleh menolak perkara
Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan

wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989). Dalam hal hukum tidak ada atau kurang jelas, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004). Ketidakbolehan pengadilan menolak perkara ini adalah dikarenakan bahwa hakim itu dianggap tahu hukum (*ius curia novit*). Bila hakim tidak menemukan hukum tertulis, maka ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dari segi lain larangan pengadilan menolak perkara ini adalah sebagai konsekuensi logis dari Mahkamah Agung dan lain-lain badan peradilan itu sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Tidak ada atau ada, kurang jelas atau jelas hukum yang mengatur perkara yang diajukan, hakim wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, sebab kalau pengadilan dibolehkan menolak perkara maka bagaimana mungkin atau ke mana lagi pencari keadilan harus mengajukan perkaranya.

f. Pemeriksaan terbuka untuk umum (*Openbaarheid van rechtspraak*)

Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004). Prinsip ini

mengisyaratkan bahwa sidang pemeriksaan di pengadilan bersifat terbuka untuk umum. Hal ini berarti bahwa setiap orang diperbolehkan hadir dan mengikuti jalannya pemeriksaan perkara di persidangan. Sebelum perkara mulai disidangkan, hakim harus menyatakan bahwa sidang perkara dibuka dan dinyatakan **terbuka untuk umum**, sepanjang undang-undang tidak menentukan lain. Bila prinsip ini tidak terpenuhi, maka dapat mengakibatkan putusan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004). Secara formil, prinsip ini memberikan kesempatan bagi kontrol sosial dan memberikan perlindungan hak asasi manusia dalam bidang peradilan. Di samping itu, prinsip ini bertujuan untuk menjamin proses peradilan yang fair dan obyektif, tidak memihak, serta terwujudnya putusan hakim yang adil.¹⁸

g. Hakim bersifat menunggu

Dalam pemeriksaan perkara perdata, yang mengajukan tuntutan hak adalah para pihak yang berkepentingan, sedangkan hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya (*iudex no procedat ex officio*) (Pasal 118 HIR/142 RBg). Bila tidak ada tuntutan hak dari

¹⁸ Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*, Djambatan, Jakarta, Cet. 2, 2005, h. 13.

para pihak, maka tidak ada hakim (*wo kein klager ist, ist kein richter; nemo iudex sine actor*).¹⁹

h. Hakim bersifat pasif (*Lijdelijkeheid van rector*)

Batas ruang lingkup pokok perkara tidak ditentukan oleh hakim, melainkan oleh para pihak yang berperkara. Hakim dalam hal ini bersifat pasif saja. Hakim hanya berfungsi membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Hakim hanya bertitik tolak pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak saja (*secundum allegat iudicare*). Hakim hanya berhak mengadili luas pokok perkara yang diajukan para pihak dan dilarang mengabulkan atau menjatuhkan putusan melebihi dari apa yang dituntut (Pasal 178 ayat (2), (3) HIR/Pasal 189 ayat (2) RBg. Dalam konteks ini peristiwa yang harus dibuktikan hanyalah peristiwa yang disengketakan saja dan kewajiban pembuktian ini ada pada para pihak yang berperkara, bukan pada hakim (*verhandlungs-maxime*). Prinsip ini mengisyaratkan pula adanya batasan kepada hakim untuk tidak dapat mencegah, bila para pihak mencabut gugatannya atau menempuh jalan perdamaian (Pasal 130 HIR/154 RBg).

i. Putusan hakim harus disertai alasan

Semua putusan pengadilan harus disertai dengan alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 25 ayat

¹⁹*Ibid.*, h. 11.

(1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Pasal 184 ayat (1), 319 HIR/195 dan 618 RBg. Alasan atau argumentasi ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim atas putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum, sehingga dengan demikian memiliki nilai-nilai obyektif. Dengan adanya alasan dan argumentasi inilah maka putusan hakim memiliki wibawa dan bukan karena figur hakim tertentu yang memutuskannya.

Untuk lebih dapat mempertanggungjawabkan putusan sering juga dicari dukungan pada yurisprudensi dan ilmu pengetahuan. Mencari dukungan pada yurisprudensi tidak berarti bahwa hakim terikat dan harus mengikuti putusan mengenai perkara yang sejenis yang pernah dijatuhkan sebelumnya oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Namun meskipun sistem peradilan di Indonesia tidak menganut asas *the binding force of precedent*, seperti yang dianut di Inggris, tentu dirasakan amatlah naif bila hakim memutuskan bertentangan dengan putusan yang telah ada sebelumnya dalam perkara yang sejenis. Hal ini disebabkan karena akan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum.

Ilmu pengetahuan hukum juga dapat menjadi sumber untuk mendapatkan bahan guna mempertanggungjawabkan putusan hakim dalam pertimbangannya. Kewibawaan ilmu

pengetahuan karena didukung oleh pengikutnya serta sifatnya yang obyektif, sehingga menyebabkan putusan hakim turut memiliki nilai obyektif pula. Menurut Schoulten,²⁰ hanya dengan mengikuti ilmu pengetahuan, hakim dapat memberikan tempat bagi putusannya dalam sistem hukum yang diperlukan. Putusan akan mengambang, bersifat subyektif, dan kurang meyakinkan, bila jauh dari hal seperti itu.

- j. Tidak ada keharusan untuk mewakilkan
HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkan penyelesaian perkaranya kepada orang lain. Dengan demikian, pemeriksaan di persidangan terjadi secara langsung terhadap pihak yang berkepentingan. Prinsip ini dilandasi oleh pemikiran bahwa hakim akan dapat mengetahui lebih jelas persoalannya, bila pemeriksaan para pihak dilakukan secara langsung. Para pihak yang berkepentinganlah yang mengetahui seluk-beluk peristiwanya. Bila para pihak memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya, maka kuasa hukum seringkali kurang mendalami peristiwa yang menjadi sengketa secara rinci, sehingga sering ia hanya siap dengan jawabannya saja, dan dalam hal hakim meminta lagi penjelasan secara lebih mendalam, biasanya ia akan menjawab akan berkonsultasi lagi dengan pihak yang diwakilinya. Itulah sebabnya

²⁰ *Ibid.*, h. 18.

wewenang mengajukan gugatan dengan lisan tidak berlaku bagi kuasa hukum. Selain itu, berperkara di pengadilan secara langsung tanpa mewakilkan kepada pengacara akan menghemat biaya.

Namun demikian, oleh karena dalam kenyataan tidak semua orang paham dan mampu tampil dengan meyakinkan dalam suatu persidangan di pengadilan, lebih-lebih lagi bagi orang yang belum pernah berhubungan dan berpengalaman berperkara di pengadilan, sehingga akan mengalami kesulitan besar dalam menjelaskan suatu peristiwa yang dialaminya, maka tidak ada pula larangan bagi para pihak untuk mewakilkan penyelesaian perkaranya kepada orang lain, para pihak dapat dibantu dan atau diwakili oleh kuasa hukumnya bila dikehendakinya (Pasal 123 HIR/147 RBg). Disinilah letak pentingnya konsultasi dan bantuan hukum dari seorang advokat atau pengacara. Kuasa hukum yang memahami hukum dan mempunyai itikad baik, jelas akan sangat membantu hakim dalam memeriksa suatu perkara, karena adanya sumbangan pikiran dalam memecahkan persoalan-persoalan hukum. Kuasa hukum yang memahami hukum akan mengemukakan peristiwa-peristiwa yang terkait dengan perkara saja sehingga memperlancar jalannya persidangan.

k. Pemeriksaan dilakukan dalam bentuk majelis

Sidang pemeriksaan pengadilan dilakukan dalam bentuk majelis yang sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004). Tujuan pemeriksaan dilakukan dalam bentuk majelis ini adalah untuk menjamin pemeriksaan yang seobyektif mungkin guna memberikan perlindungan hak asasi manusia dalam bidang peradilan.

1. Pemeriksaan dilakukan dalam dua tingkat (*Onderzoek in twee instanties*)

Pemeriksaan perkara hanya dilaksanakan di dua tingkat instansi pengadilan saja, yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 dijelaskan bahwa Pengadilan Negeri merupakan pengadilan tingkat pertama, sedangkan Pengadilan Tinggi merupakan pengadilan tingkat banding.

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi memeriksa perkara perdata berdasarkan faktanya, disebut juga dengan *yudex factie*. Bila para pihak tidak puas dan tidak menerima putusan Pengadilan Negeri dapat melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi (Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004). Pemeriksaan perkara di tingkat banding ini sebenarnya identik dengan apa yang dilakukan di Pengadilan Negeri, dan merupakan pengulangan pemeriksaan perkara saja. Peradilan tingkat pertama disebut

juga dengan *original jurisdiction*, sedangkan peradilan dalam tingkat banding yang bersifat mengulang pemeriksaan perkara yang telah diputus oleh pengadilan dalam peradilan tingkat pertama disebut dengan *apellate jurisdiction*. Banding merupakan pemeriksaan tingkat kedua dan terakhir, karena banding merupakan tahap pemeriksaan yang paling terakhir dari segi peristiwa dan hukumnya.

m. Pengawasan putusan pengadilan melalui kasasi (*Toezicht op de rechtspraak door van cassatie*)

Pengawasan putusan pengadilan melalui kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan pengadilan yang diawasi adalah putusan *yudex factie*-nya saja yang dilakukan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi (Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985/Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986).

Konsekuensi dari adanya fungsi Mahkamah Agung dalam mengawasi putusan pengadilan melalui kasasi, maka esensi prinsip ini mengandung 2 pengertian, yaitu:

- 1) Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dari lingkungan peradilan yang ada di bawahnya, karena:
 - a) Badan peradilan tersebut tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; dan

c) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

2) Mahkamah Agung bukanlah instansi peradilan tingkat tiga.

Mahkamah Agung bukan merupakan instansi peradilan tingkat tiga disebabkan karena fakta-fakta peristiwa yang terjadi dalam suatu sengketa tidak termasuk dalam penilaian Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi.

Selain tugas melakukan pengawasan dalam teknis peradilan, Mahkamah Agung RI juga berfungsi sebagai pengawas teknis administratif yaitu mencakup teknis peradilan, administrasi peradilan, perbuatan dan tingkah laku hakim dan pejabat kepaniteraan (Pasal 32 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985/Pasal 2 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 005/SK/III/1994, tanggal 31 Maret 1994).

n. Berperkara dikenakan biaya (*Niet kosteloze rechtspraak*)

Berperkara di pengadilan dikenakan biaya perkara (Pasal 121 ayat (4), 182, 183 HIR/Pasal 145 ayat (1), 192 dan 194 RBg). Biaya perkara meliputi: biaya kepaniteraan, biaya pemanggilan para pihak, biaya pemberitahuan, biaya meterai dan biaya administrasi (SEMA Nomor 5 Tahun 1994). Demikian pula bila para pihak menggunakan jasa pengacara

atau konsultan hukum, maka tentu juga harus mengeluarkan biaya.

Bagi mereka yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (*prodeo*) dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh kepala polisi (Pasal 237 HIR/273 RBg). Dalam praktik, surat keterangan tidak mampu ini cukup dibuat oleh Kepala Desa yang disahkan oleh Camat di daerah yang berkepentingan menetap.

Permohonan berperkara secara *prodeo* ini akan ditolak Hakim, bila ternyata penggugat ternyata bukan orang yang tidak mampu.

2. Yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Peradilan Agama

Terdapat beberapa prinsip (asas) peradilan yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Peradilan Agama yang berlaku untuk pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, yakni:

a. Asas personalitas ke-Islam-an

Asas ini bermakna bahwa yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama hanya mereka yang mengaku dirinya pemeluk agama Islam, penganut agama lain di luar Islam atau yang non Islam, tidak

tunduk dan tidak dapat dipaksakan tunduk kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 2, Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dari penegasan ketiga ketentuan ini dapat dilihat bahwa asas personalitas ke-Islam-an sekaligus dikaitkan berbarengan dengan perkara perdata bidang tertentu, yakni sepanjang mengenai sengketa perkara yang menjadi kewenangan lingkungan Peradilan Agama. Jadi ketundukan personalita muslim kepada lingkungan Peradilan Agama, bukan ketundukan yang bersifat umum meliputi semua bidang hukum perdata. Ketundukan personalita muslim kepada lingkungan Peradilan Agama hanya bersifat khusus sepanjang bidang hukum perdata tertentu, yakni bidang: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah berdasarkan Hukum Islam. Jika ketiga ketentuan yang menegaskan asas personalitas ke-Islam-an ini diuraikan, dijumpai beberapa penegasan yang melekat membarengi asas dimaksud, yakni:

- a) Pihak-pihak yang bersengketa harus sama-sama pemeluk agama Islam;
- b) Perkara perdata yang disengketakan harus mengenai perkara-perkara di bidang perkawinan;
- c) Hubungan hukum yang melandasi hubungan keperdataan tertentu tersebut berdasarkan Hukum Islam,

oleh karena itu acara penyelesaiannya berdasarkan Hukum Islam.²¹

- b. Proses peradilan dilakukan dengan mengatasnamakan Ketuhanan Yang Maha Esa
Sama halnya dengan pengadilan dalam lingkungan peradilan lainnya, proses Peradilan Agama dilakukan dengan mengatasnamakan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bedanya adalah kalau dalam lingkungan peradilan lainnya pencerminan dari prinsip ini, setiap putusan pengadilan dimulai dengan kalimat: "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004), maka dalam lingkungan Peradilan Agama setiap putusan dimulai dengan kalimat: *Bismillahirrahmanirrahim*, baru diikuti dengan kalimat: *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa* (Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).
- c. Proses pemeriksaan sengketa perkawinan
Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menentukan bahwa tugas dan wewenang Peradilan Agama salah satunya adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perkawinan. Dalam Penjelasan Pasal ini ditentukan bahwa perkawinan yang dimaksud adalah

²¹M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1990), h. 37-38.

perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang meliputi masalah:

- 1) Izin beristeri lebih dari seorang;
- 2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- 3) Dispensasi perkawinan;
- 4) Pencegahan perkawinan;
- 5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- 6) Pembatalan perkawinan;
- 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri;
- 8) Perceraian karena talak;
- 9) Gugatan perceraian;
- 10) Penyelesaian harta bersama;
- 11) Mengenai pengasuhan anak-anak;
- 12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
- 13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri;
- 14) Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
- 15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- 16) Pencabutan kekuasaan wali;

- 17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
 - 18) Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;
 - 19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
 - 20) Penetapan asal-usul seorang anak;
 - 21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran; dan
 - 22) Pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.
- Terhadap proses pemeriksaan perkara-perkara perkawinan ini, sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Drs. H. Arso, M.A, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan,²² di samping mengacu kepada prinsip-prinsip hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, mengacu pula kepada prinsip-prinsip hukum acara perdata yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Peradilan Agama. Undang-Undang Peradilan Agama telah mengadakan aturan

²²Wawancara pribadi dengan Bapak Drs. H. Arso, M.A. pada tanggal 17 September 2007.

tersendiri tentang acara pemeriksaan perkara cerai talak (Pasal 66-72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) dan cerai gugat (Pasal 73-86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).

C. Relevansi Hukum Acara Peradilan Islam dengan Hukum Acara Peradilan Agama

Dalam menjelaskan relevansi Hukum Acara Peradilan Islam dengan Hukum Acara Peradilan Agama ini dilakukan dengan cara: terlebih dahulu menguraikan prinsip-prinsip Hukum Acara Peradilan Islam itu satu per satu, selanjutnya prinsip-prinsip itu dihubungkan dengan Hukum Acara Peradilan Agama untuk melihat sejauh mana telah diadopsi ke dalam Hukum Acara Peradilan Agama.

1. Wajib (sangat urgen) nya suatu lembaga peradilan di tengah-tengah masyarakat

Mengenai relevansi prinsip ini dengan prinsip-prinsip Hukum Acara Peradilan Agama dapat disimpulkan bahwasannya prinsip ini sangat relevan dengan salah satu prinsip Hukum Acara Peradilan Agama. Mengenai urgensi lembaga peradilan ini dalam prinsip Hukum Acara Peradilan Agama dinyatakan dalam prinsip: "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka." Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata

- Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004). Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan Kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004).
2. Memutuskan kasus setelah memahami duduk persoalan
- Mengenai relevansi prinsip ini dengan prinsip-prinsip Hukum Acara Peradilan Agama dapat disimpulkan bahwasannya prinsip ini juga sangat relevan dengan salah satu prinsip Hukum Acara Peradilan Agama. Mengenai prinsip memutuskan kasus setelah memahami duduk persoalan, dalam prinsip-prinsip Hukum Acara Peradilan Agama dinyatakan dalam prinsip: Putusan hakim harus disertai alasan. Semua putusan pengadilan harus disertai dengan alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Pasal 184 ayat (1), 319 HIR/195 dan 618 RBg. Alasan atau argumentasi ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim atas putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum, sehingga dengan

demikian memiliki nilai-nilai obyektif. Dengan adanya alasan dan argumentasi inilah maka putusan hakim memiliki wibawa dan bukan karena figur hakim tertentu yang memutuskannya. Untuk lebih dapat mempertanggungjawabkan putusan sering juga dicari dukungan pada yurisprudensi dan ilmu pengetahuan. Mencari dukungan pada yurisprudensi tidak berarti bahwa hakim terikat dan harus mengikuti putusan mengenai perkara yang sejenis yang pernah dijatuhkan sebelumnya oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Namun meskipun sistem peradilan di Indonesia tidak menganut asas *the binding force of precedent*, seperti yang dianut di Inggris, tentu dirasakan amatlah naif bila hakim memutuskan bertentangan dengan putusan yang telah ada sebelumnya dalam perkara yang sejenis. Hal ini disebabkan karena akan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum.

Ilmu pengetahuan hukum juga dapat menjadi sumber untuk mendapatkan bahan guna mempertanggungjawabkan putusan hakim dalam pertimbangannya. Kewibawaan ilmu pengetahuan karena didukung oleh pengikutnya serta sifatnya yang obyektif, sehingga menyebabkan putusan hakim turut memiliki nilai obyektif pula. Sebagaimana menurut Schoultzen, hanya dengan mengikuti ilmu pengetahuan, hakim dapat memberikan tempat bagi putusannya dalam sistem hukum yang diperlukan. Putusan akan mengambang, bersifat subyektif, dan kurang meyakinkan, bila jauh dari hal seperti itu. Dalam prinsip putusan hakim harus

disertai alasan ini tentu hakim dalam memutuskan kasus setelah memahami duduk persoalan. Putusan hakim tentu akan tidak beralasan, tidak dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum, dan tidak memiliki nilai obyektif apabila diputuskan tanpa memahami duduk persoalannya.

3. Prinsip persamaan di hadapan hukum

Mengenai relevansi prinsip ini dengan prinsip-prinsip Hukum Acara Peradilan Agama dapat disimpulkan bahwasannya prinsip ini juga sangat relevan dengan prinsip-prinsip Hukum Acara Peradilan Agama. Mengenai prinsip persamaan di hadapan hukum ini, dalam prinsip-prinsip Hukum Acara Peradilan Agama dinyatakan dalam prinsip: Hakim mengadili kedua belah pihak yang berperkara (*Horen van beide partijen*). Peradilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004). Hakim harus memperlakukan kedua belah pihak yang berperkara dalam kapasitas yang sama, tidak memihak, dan mendengar keterangan dari kedua belah pihak. Kedua belah pihak harus diberikan kesempatan yang sama untuk didengar keterangan atau pendapatnya. Hal ini juga bermakna bahwa pengajuan alat bukti harus dilakukan di muka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak (Pasal 132 a, 121 ayat (2) HIR, 145 ayat (2), 157 RBg, 47 Rv).

4. Kewajiban (beban) pembuktian

Mengenai relevansi prinsip ini dengan prinsip-prinsip Hukum Acara Peradilan Agama dapat disimpulkan bahwasannya Hukum Acara Peradilan Agama juga menganut prinsip pembuktian yang sama dengan prinsip beban pembuktian yang terkandung dalam prinsip-prinsip hukum acara peradilan Islam. Pasal 163 HIR/283 RBG memberikan pedoman tentang pembagian beban pembuktian bahwa barangsiapa yang mengaku memiliki suatu hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya untuk membantah hak orang lain, maka diwajibkan untuk membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Dari bunyi pasal ini bisa dipahami bahwa baik tergugat maupun penggugat dapat dibebani beban pembuktian. Terutama bagi penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukan dalam gugatannya. Begitu juga bagi tergugat berkewajiban membuktikan terhadap bantahan yang diberikannya. Penggugat tidak diwajibkan membuktikan kebenaran bantahan tergugat. Demikian pula sebaliknya, tergugat tidak diwajibkan untuk membuktikan kebenaran peristiwa yang diajukan oleh penggugat. Apabila penggugat tidak dapat membuktikan peristiwa yang diajukannya, maka ia harus dikalahkan. Sebaliknya, bila tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya, maka ia harus pula dikalahkan. Jadi bila salah satu pihak dibebani dengan beban pembuktian dan ia tidak dapat membuktikan hal tersebut, maka ia harus menerima risiko pembuktian, yaitu dikalahkan dalam perkara tersebut.

Selain Pasal 163 HIR/283 RBg, pasal-pasal berikut ini merupakan ketentuan khusus mengenai beban pembuktian sebagai berikut:

- a) Pasal 533 KUH Perdata yang berbunyi: "Orang yang menguasai barang tidak perlu membuktikan itikad baiknya. Siapa yang mengemukakan itikad buruk harus membuktikannya."
 - b) Pasal 535 KUH Perdata yang berbunyi: "Bila seseorang telah mulai menguasai sesuatu untuk orang lain, maka selalu dianggap meneruskan penguasaan tersebut, kecuali apabila terbukti sebaliknya."
 - c) Pasal 1244 KUH Perdata yang berbunyi: "Kreditur dibebaskan dari pembuktian kesalahan debitur dalam hal adanya wanprestasi."
5. **Penyelesaian perkara melalui perdamaian**
- Mengenai relevansi prinsip ini dengan prinsip-prinsip Hukum Acara Peradilan Agama dapat disimpulkan bahwasannya Hukum Acara Peradilan Agama juga meletakkan prinsip penyelesaian perkara melalui perdamaian ini menjadi salah satu prinsipnya. Pasal 130 HIR/154 RBg menentukan Hakim harus berusaha mendamaikan para pihak pada hari sidang yang telah ditetapkan. Peranan Hakim dalam usaha menyelesaikan perkara lewat jalur perdamaian merupakan hal yang sangat penting. Putusan perdamaian memiliki arti yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi pencari keadilan. Hal ini

disebabkan karena cara perdamaian merupakan prosedur penyelesaian sengketa yang mudah, cepat dan biaya ringan. Selain itu, kemungkinan konflik dan dendam yang berkepanjangan antara para pihak dapat dieliminir sekecil mungkin. Dibandingkan dengan penyelesaian perkara melalui proses pemeriksaan dengan cara *contradictoir*, penyelesaian perkara melalui perdamaian tentu lebih baik. Bagaimanapun adilnya suatu putusan, akan tetap saja lebih baik dan lebih adil hasil perdamaian. Dalam suatu putusan yang bagaimanapun adilnya, pasti harus ada pihak yang dikalahkan dan dimenangkan. Tidak mungkin kedua pihak sama-sama dimenangkan atau sama-sama dikalahkan. Seadil-adilnya putusan yang dijatuhkan Hakim, akan tetap dirasa tidak adil oleh pihak yang kalah. Bagaimanapun jalimnya putusan yang dijatuhkan, akan dianggap dan dirasa adil oleh pihak yang menang. Lain halnya dengan perdamaian, hasil perdamaian yang tulus berdasarkan kesadaran bersama dari pihak yang bersengketa, terbebas dari kualifikasi kalah dan menang. Para pihak sama-sama menang dan sama-sama kalah. Kedua belah pihak pulih dalam suasana rukun dan persaudaraan. Tidak dibebani dendam kesumat yang berkepanjangan.

Dalam praktik, bila Hakim berhasil mendamaikan para pihak yang berperkara, maka dibuatlah akta perdamaian dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaati isi dari akta perdamaian tersebut. Akta perdamaian memiliki kekuatan hukum yang sama

dengan putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Bagi pihak yang diwajibkan menyerahkan sesuatu atau diharuskan membayar sejumlah uang tertentu dan ternyata tidak melakukannya secara sukarela untuk memenuhi kewajiban hukumnya, maka eksekusi harus dilakukan dengan cara paksa. Selain itu dapat juga ditempuh melalui pelelangan barang-barang yang bersangkutan untuk memperoleh sejumlah uang yang harus dibayar kepada pihak yang berhak menerimanya atau untuk membayar biaya perkara.

Oleh karena perdamaian bersifat sukarela dan merupakan wujud persetujuan kedua belah pihak, maka terhadap putusan perdamaian tidak diperkenankan mengajukan upaya hukum banding dan kasasi (Pasal 130 ayat (3) HIR). Putusan perdamaian dianggap telah menyelesaikan proses perkara di pengadilan. Bila di suatu waktu salah satu pihak yang pernah berdamai tersebut mengajukan kembali gugatan yang sama, maka gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima karena memenuhi asas *ne bis in idem*.

Meskipun penyelesaian perkara melalui perdamaian ini sangat luhur, penyelesaian perkara melalui perdamaian ini sering dikotori dan dinodai oleh sementara Hakim.²³ Praktik fungsi mendamaikan, menyimpang dari keluhuran dan menjelma dalam bentuk pemaksaan dan perkosaan. Praktik fungsi mendamaikan

²³Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, h.

yang diperankan sementara Hakim, persih memperagakan filsafat *belah bambu*. Yang sebelah diinjak dan yang sebelah diangkat. Dengan bertameng perisai fungsi mendamaikan, sementara Hakim bertindak menjadi aktor dan sekaligus martel. Hakim yang membidani dan melahirkan perdamaian sesuai keinginan pihak yang hendak diangkat. Pihak yang diinjak sama sekali tidak didengar dan tidak dibawa serta. Sesudah Hakim siap menyusun perdamaian menurut keinginan pihak yang hendak diangkat, tanpa setahu pihak yang diinjak, Hakim memalu godamnya dengan martil. Alhasil perdamaian yang terjadi lebih kejam dari perkosaan. Sama sekali tidak membuahkan kedamaian, kerukunan dan persaudaraan, tetapi mendatangkan malapetaka pada pihak yang diinjak. Berapa banyak pengalaman bercerita akan kasus perdamaian yang seperti itu dalam praktik peradilan. Banyak laporan dan pengaduan yang bernada praktik *belah bambu*, cuman sering laporan dan pengaduan itu lenyap ditelan oleh keangkeran formil atas alasan bahwa perdamaian yang terwujud yang dituangkan dalam putusan perdamaian sudah memenuhi syarat-syarat formil. Penegakan hukum dan keadilan pun bungkam dan terkubur oleh keangkuhan aturan formil.

6. Peninjauan kembali suatu keputusan yang telah dijatuhkan
- Mengenai relevansi prinsip ini dengan prinsip-prinsip Hukum Acara Peradilan Agama adalah bahwa prinsip ini juga didapati dalam Hukum Acara Peradilan Agama. Prinsip dalam Hukum Acara Peradilan Agama yang bermakna bahwa apabila suatu

perkara telah diselesaikan dengan baik, namun belakangan diketahui kembali bahwa di dalam keputusan itu terdapat kebatilan maka dapat dilakukan peninjauan kembali terhadap keputusan tersebut sebagai makna prinsip peninjauan kembali suatu keputusan yang telah dijatuhkan ditegaskan dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang berbunyi: "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali yang ditujukan kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang." Selanjutnya dalam Pasal 23 ayat (2) ditentukan: "Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali."²⁴

7. Hakim bersikap proaktif membantu para pihak (pencari keadilan) demi terselenggaranya proses peradilan
- Prinsip ini juga dapat diketemukan dalam prinsip-prinsip Hukum Acara Peradilan Agama. Prinsip dalam Hukum Acara Peradilan Agama yang bermakna sama dengan prinsip ini adalah prinsip Hakim bersifat pasif (*Lijdelijkeheid van rector*). Artinya dalam menentukan batas ruang lingkup pokok perkara hakim memang pasif karena ditentukan oleh para pihak yang berperkara, namun Hakim sebagai pemimpin sidang dalam pemeriksaan perkara harus bersifat aktif dalam setiap upaya untuk mengungkapkan

²⁴Selengkapnya penjelasan tentang peninjauan kembali putusan yang telah dijatuhkan ini, lihat Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, h. 407-417; Nasir, *Hukum Acara Perdata*, h. 226-231.

kebenaran, karenanya hakim dapat memberi bantuan kepada para pihak untuk terselenggaranya peradilan yang adil, jujur, sederhana, cepat dan biaya ringan.

8. Kewajiban menggali hukum yang hidup dan melakukan penalaran logis

Begitupun dengan prinsip ini, dapat diketemukan padanannya dalam Hukum Acara Peradilan Agama. Prinsip dalam Hukum Acara Peradilan Agama yang bermakna sama dengan prinsip ini adalah prinsip Pengadilan tidak boleh menolak perkara. Ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Dalam hal hukum tidak ada atau kurang jelas, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004). Ketidakbolehan pengadilan menolak perkara ini adalah dikarenakan bahwa hakim itu dianggap tahu hukum (*ius curia novit*). Bila hakim tidak menemukan hukum tertulis, maka ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

9. Pada prinsipnya setiap orang dapat bertindak menjadi saksi

Tentang prinsip ini, hukum acara Peradilan Agama pada dasarnya juga membolehkan setiap orang untuk menjadi saksi, asal bukan dari pihak yang bersengketa. Mereka yang dalam undang-undang Peradilan Agama tidak diperkenankan untuk menjadi saksi bagi para pihak di pengadilan dibagi dalam 2 kelompok, yakni:

a. Golongan yang dianggap tidak mampu

Golongan ini dibagi atas 2 kelompok, yakni:

1) Golongan yang tidak mampu secara mutlak

Golongan ini secara mutlak tidak dapat diminta dan didengar keterangannya, yakni:

- a) Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan lurus dari salah satu pihak (Pasal 145 ayat (1) sub 1 HIR/172 ayat (1) RBG/1910 alinea 1 KUH Perdata);
- b) Suami atau isteri dari salah satu pihak, meskipun sudah bercerai (Pasal 145 ayat (1) sub 2 HIR/172 ayat (1) sub 3 RBG/1910 alinea 1 KUH Perdata).

Namun demikian, golongan ini tidak boleh ditolak menjadi saksi dalam perkara yang menyangkut kedudukan keperdataan dari para pihak atau dalam perkara tentang perjanjian kerja (Pasal 145 ayat (2) HIR/172 ayat (2) RBG/1910 alinea 2 KUH Perdata). Pasal 1910 alinea 2 sub 2 dan 3 KUH Perdata menambahkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan

pemberian nafkah dan penyelidikan tentang hal-hal yang menyebabkan pencabutan kekuasaan orang tua dan perwalian. Dalam hal seperti ini mereka tidak wajib mengundurkan diri sebagai saksi.

2) Golongan yang tidak mampu secara relatif

Golongan ini boleh didengar keterangannya, tetapi tidak dianggap sebagai saksi. Keterangan mereka hanya boleh dianggap sebagai penjelasan belaka, dan mereka tidak perlu disumpah dalam memberikan keterangan. Mereka ini adalah:

- a) Anak-anak yang belum mencapai umur 15 tahun (Pasal 145 ayat (1) sub 3 jo ayat (4) HIR/173 ayat (1) sub 4 jo 173 RBg/1912 KUH Perdata);
 - b) Orang gila, walaupun kadang-kadang ingatannya pulih dan sehat (Pasal 145 ayat 1 sub 4 HIR/172 ayat (1) sub 5 RBg/1912 KUH Perdata);
 - c) Orang yang berada di bawah pengampunan.
- b. Golongan yang dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi.

Ada segolongan orang yang atas permintaannya sendiri dibebaskan dari kewajiban untuk menjadi saksi. Mereka ini boleh mengundurkan diri untuk memberikan keterangan sebagai saksi di pengadilan (Pasal 146 HIR/174 RBg/1909 aline 2 KUH Perdata). Mereka itu adalah:

- 1) Saudara laki-laki dan perempuan serta ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak;

- 2) Keluarga sedarah menurut keturunan garis lurus;
- 3) Saudara laki-laki dan perempuan dari suami atau isteri salah satu pihak; dan
- 4) Orang-orang tertentu yang karena martabat, jabatan, atau hubungan kerja yang sah diwajibkan menjaga rahasia, semata-mata hanya tentang hal yang diberitahukan kepadanya karena martabat, jabatan, atau hubungan kerja yang sah saja. Hal ini mengingat kenyataan bahwa dalam masyarakat kita terpaksa mempercayakan hal-hal yang bersifat pribadi kepada orang tertentu, misalnya dokter, pengacara, notaris, polisi, agamawan, dan lain-lain.

Perbedaan prinsip dalam hukum acara Peradilan Islam ini dengan persyaratan saksi dalam undang-undang Peradilan Agama adalah dalam undang-undang Peradilan Agama tidak ditentukan bahwa saksi itu harus adil, tidak pernah dijatuhi hukuman had, dan tidak diragukan asal-usulnya seperti dipersyaratkan dalam prinsip hukum acara Peradilan Islam.

10. Larangan bersidang ketika sedang emosional

Tentang prinsip ini secara tersurat tidak dapat diketemukan dalam Hukum Acara Peradilan Agama. Artinya tidak ada ketentuan dalam hukum acara Peradilan Agama yang menegaskan tentang hal ini. Namun demikian sebagaimana menurut Roihan A. Rasyid, sebagai peradilan perdata dan Islam di Indonesia yang harus mengindahkan peraturan perundang-

undangan negara dan syari'at Islam sekaligus, prinsip ini tentu merupakan sesuatu yang harus diindahkan oleh para hakim.

Demikianlah Relevansi Hukum Acara Peradilan Islam itu dengan Hukum Acara Peradilan Agama, dari 10 prinsip hukum acara Peradilan Islam sebagaimana yang tersimpul dari risalah Umar ibn Khattab yang dikirimkannya kepada Abu Musa al-Asy'ari, 9 prinsip di antaranya secara tegas bahkan ditentukan dalam hukum acara Peradilan Agama, yakni:

1. Wajib (sangat urgen) nya suatu lembaga peradilan di tengah-tengah masyarakat;
2. Memutuskan kasus setelah memahami duduk persoalan;
3. Prinsip persamaan di hadapan hukum;
4. Kewajiban (beban) pembuktian;
5. Penyelesaian perkara melalui perdamaian;
6. Peninjauan kembali suatu keputusan yang telah dijatuhkan;
7. Hakim bersikap proaktif membantu para pihak (pencari keadilan) demi terselenggaranya proses peradilan;
8. Kewajiban menggali hukum yang hidup dan melakukan penalaran logis; dan
9. Pada prinsipnya setiap orang dapat bertindak menjadi saksi.

Adapun 1 prinsip lagi, yakni prinsip: larangan bersidang ketika sedang emosional, meskipun tidak ada ketentuan dalam hukum acara Peradilan Agama yang secara tegas menentukan hal tersebut, namun sebagai peradilan perdata dan Islam di Indonesia yang harus mengindahkan peraturan perundang-undangan negara dan syari'at

Islam sekaligus, sebagaimana dijelaskan Roihan A. Rasyid merupakan sesuatu hukum yang harus diindahkan pula oleh para hakim.

Timbul pertanyaan, kalau prinsip-prinsip hukum acara Peradilan Islam itu begitu relevan dengan prinsip-prinsip hukum acara Peradilan Agama, atau dengan perkataan lain kalau hukum acara Peradilan Agama itu sesungguhnya mempunyai relevansi dan dapat diketemukan landasan hukumnya dalam hukum acara Peradilan Islam, mengapakah tidak ditegaskan saja dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 itu bahwa hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama itu adalah hukum acara Peradilan Islam? Hal ini tentu menjadi pertanyaan, sebab sebagaimana diketahui bahwa ditentukan dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama itu adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.

Diduga mengapa Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menentukan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama itu adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum setidaknya-tidaknya karena dua hal, yakni: *pertama*, dari segi materi hukum, pada saat disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 belum tersusun sebuah materi hukum acara Peradilan Islam yang lengkap dalam sebuah naskah yang siap untuk diundangkan.

Materi hukum acara Peradilan Islam pada saat itu masih tersebar dalam berbagai kitab fiqh. Lihatlah masih betapa terbatasnya materi hukum acara dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dalam Bab IV, Pasal 54-91. Dengan materi hukum acara seperti itu tentu Peradilan Agama sebagai sebuah badan peradilan tidak dapat melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan. Kedua, Untuk dapat ditetapkan menjadi sebuah undang-undang Peradilan Agama diperlukan sebuah hukum acara. Mengingat pada saat disahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 belum tersusun sebuah naskah hukum acara Peradilan Islam yang lengkap dalam sebuah naskah sebagai hukum acara Peradilan Agama, maka mau tidak mau harus memberlakukan (menetapkan) hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum sebagai hukum acara undang-undang Peradilan Agama.

Namun setelah tujuh belas tahun berlaku dan mengalami perubahan pada tahun 2006 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mengapakah hukum acara dalam undang-undang Peradilan Agama itu belum juga beranjak. Sekarang tentu sudah saatnya untuk menyusun sebuah hukum acara peradilan agama yang bersendikan hukum acara peradilan Islam, apalagi hal tersebut merupakan amanat undang-undang. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004: "Susunan kekuasaan dan hukum acara Mahkamah Agung dan badan peradilan

yang berada di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dengan Undang-Undang.”

Sebagai langkah awal untuk penyusunan hukum acara tersebut tentu patut kiranya dihargai upaya yang telah dilakukan Proyek Peningkatan Penyuluhan Hukum Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama yang pada tahun 1994 telah berhasil menyusun sebuah Kompilasi Hukum Acara Islam (KHAI). KHAI ini dapat dipergunakan sebagai bahan acuan untuk menyusun hukum acara bagi Undang-Undang Peradilan Agama. Setidaknya dalam KHAI ini sudah diletakkan sendi-sendi hukum acara Peradilan Islam itu.²⁵

²⁵Selengkapnya isi kandungan KHAI itu, lihat *Kompilasi Hukum Acara Islam*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Penyuluhan Hukum Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1994/1995).

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membahas masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini, sampailah penelitian ini pada kesimpulan sebagai berikut:

1. Prinsip-prinsip peradilan Islam itu, sebagaimana risalah Umar ibn Khatlab yang dikirimkannya kepada Abu Musa al-Asy'ari (Abdullah ibn Qais) tentang pedoman dan dasar-dasar mengadili bagi para hakim adalah:
 - a. Wajib (sangat urgen) nya suatu lembaga peradilan di tengah-tengah masyarakat;
 - b. Memutuskan kasus setelah memahami duduk persoalan;
 - c. Prinsip persamaan di hadapan hukum;
 - d. Kewajiban (beban) pembuktian;
 - e. Penyelesaian perkara melalui perdamaian;
 - f. Peninjauan kembali suatu keputusan yang telah dijatuhkan;
 - g. Hakim bersikap proaktif membantu para pihak (pencari keadilan) demi terselenggaranya proses peradilan;
 - h. Kewajiban menggali hukum yang hidup dan melakukan penalaran logis;
 - i. Pada prinsipnya setiap orang dapat bertindak menjadi saksi; dan
 - j. Larangan bersidang ketika sedang emosional.

2. Prinsip-prinsip hukum acara Peradilan Islam itu sangat relevan dengan hukum acara Peradilan Agama. Dari kesemua prinsip hukum acara Peradilan Agama, hampir semua dapat ditemukan landasan hukumnya dalam hukum acara Peradilan Islam. Sepuluh prinsip peradilan Islam sebagaimana risalah Umar ibn Khattab yang dikirimkannya kepada Abu Musa al-Asy'ari (Abdullah ibn Qais) tentang pedoman dan dasar-dasar mengadili bagi para hakim, sembilan prinsip di antara juga merupakan prinsip dalam hukum acara Peradilan Agama. Satu-satunya prinsip dalam hukum acara Peradilan Islam yang tidak dapat ditemukan penegasannya dalam hukum acara Peradilan Agama adalah prinsip larangan bersidang ketika sedang emosional. Namun demikian walaupun tidak ada ketentuan secara eksplisit tentang larangan tersebut, sebagai peradilan perdata dan Islam di Indonesia yang harus mengindahkan peraturan perundang-undangan negara dan syari'at Islam sekaligus, maka larangan tersebut harus pula diindahkan oleh para hakim.

B. Saran

Setelah memperhatikan pertimbangan dari berbagai sudut, baik dari sudut *konsistensi*, bahwa tidak konsisten memberlakukan Hukum Acara Perdata dalam lingkungan Peradilan Umum sebagai hukum acara Peradilan Agama (hukum formiel) karena dalam hukum materielnya telah diberlakukan Hukum Islam, yakni Kompilasi

Hukum Islam (KHI); Dari sudut *politis*, bahwa menggunakan Hukum Acara Perdata dalam lingkungan Peradilan Umum sebagai hukum acara Peradilan Agama notabene memberlakukan hukum peninggalan pemerintah kolonial Belanda; Bahwa adanya undang-undang tentang acara Peradilan Agama itu adalah perintah undang-undang sebagaimana ditentukan dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, maka disarankan untuk segera dilakukan langkah-langkah guna penyusunan hukum acara Peradilan Agama yang bersendikan hukum acara Peradilan Islam.

Tulis, Muhammad Abdul Kadir Abu, *Al-Qadri al-Jami*, Tip Da al-Fiqh, 1984.

Putra, *Putra-Putra Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kenema, 2005.

Harah, A., *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.

Harah, M. Yabir, *Kabupaten, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1990.

Haman, Hani Ibrahim, *Tarikh al-Islam Jil. 1*, Tip Maktabah al-Murisyah, n.

Haman, Hani Ibrahim, *Al-Nizam al-Islamiyyah*, Tip Maktabah al-Murisyah, n.

Ibn Hayan, Abd. Rahman, *Al-Qadri al-Jami*, Tip Maktabah al-Murisyah, 1984.

—————, *Kompilasi Hukum Acara Islam*, Jakarta: Proyek Penelitian Penyusunan Hukum Direktorat Pembinaan Badan

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Bustanul, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia (Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya)*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Asshiddiqie, Jimly, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Angkasa, 1995.

Departemen Agama R.I., *Kebijaksanaan Departemen Agama di Indonesia*, Jakarta: Balitbang Depag, 1996.

Ditbinpértais Departemen Agama, *Kenang-Kenangan se-Abad Pengadilan Agama*, Jakarta: CV Ade Cahya, 1985.

Faris, Muhammad Abduk Kadir Abu, *Al-Qada fi al-Islam*, Ttp: Dar al-Furqan, 1984.

Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Hanafi, A., *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Harahap, M. Yahya, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1990.

Hasan, Hasan Ibrahim, *Tarikh al-Islam Juz I*, Ttp: Maktabah Nahdhah al-Misriyyah, tt.

Hasan, Hasan Ibrahim, *Al Nuzhum al-Islamiyyah*, Ttp: Maktabah Nahdhah al-Misriyyah, tt.

Ibn. Hayim, Abd. Rahman, *Al Qada wa Nizamuhu fi al-Kitab wa al-Sunnah*, Ttp: Mathba'ah Jami'ah al Qura, 1984.

-----, *Kompilasi Hukum Acara Islam*, Jakarta: Proyek Peningkatan Penyuluhan Hukum Direktorat Pembinaan Badan

Peradilan Agama Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1994.

Lev, Daniel S, *Islamic Courts in Indonesia* (terjemahan H.A. Zaini Noeh, Peradilan Agama Islam di Indonesia), Jakarta: Intermedia, 1995.

Manan, Abdul, *Hukum Islam dalam Berbagai Wacana*, Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003.

Mahmasani, Shabhi, *I'alsafah al-Tasyri' fi al-Islam* (alih bahasa Ahmad Sujono), Bandung: al-Ma'arif, 1977.

Musyrifah, Athiyah Mustafa, *Al Qada fi al-Islam*, Ttp: Syirkah al-Syarq al-Ausat, 1964.

Nasir, Muhammad, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Djambatan, 2005.

Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya I*, Jakarta: U.I. Press, 1978.

Noeh, HZA dan H.A. Basith Adnan, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1983.

Nutuddin, Amiur, *Ijtihad Umar ibn al-Khattab*, Jakarta: Rajawali Press, 1987.

Pagar, *Dasar-Dasar Peradilan di Indonesia: Analisis terhadap Risalah Umar ibn al-Khattab dan Relevansinya dengan Indonesia* (makalah), tt.

Rasyid, Roihani A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 1991.

Rasyid, Chatib, *Peranan Fakultas Syari'ah dan Pengadilan Agama dalam Menegakkan Hukum Islam* (makalah yang disampaikan

pada pelaksanaan Studium General Fakultas Syari'ah IAIN-SU Tahun 2007.

Schaht, Joseph, *Pengantar Hukum Islam* (terjemahan), Jakarta: P3SPTA, 1985.

Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 1987.

Ash-Shiddiqy, Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Bandung: al-Ma'arif, 1964.

Sitompul, Anwar, *Kewenangan dan Tata Cara di Pengadilan Agama*, Bandung: Armico, 1984.

Al-Thahawi, Sulaiman Muhammad, *Umar ibn Khattab wa al-Usul al Siyasah wa al-Iradat al Hadisah: Dirasat al Muqaranah*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1976.

Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu Juz VI*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.